



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 6

TAHUN : 2017

PERATURAN DESA HARGOREJO

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
PERIODE TAHUN 2015 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2015 - 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

15.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

16.Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 -2020;

17.Peraturan Desa Hargorejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;

18.Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun 2017; dan

19.Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PERIODE TAHUN 2015 – 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Hargorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Hargorejo
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

- dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
 23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

1. RPJM Desa disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Desa.
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2015 – 2020.
3. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
4. Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui MUSRENBANGDES.
5. Hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Desa.

(2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 17 November 2017
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 17 November 2017
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA' ENI

BERITA DESA HARGOREJO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 6 TAHUN 2017

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO
DAN
KEPALA DESA HARGOREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA HARGOREJO
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6/KB/BPD/2017

NOMOR : 6/KB/PD/2017.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) PERIODE TAHUN 2015 - 2020.

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Hargorejo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2015 - 2020.

MENJADI

Peraturan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2015 - 2020.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

Drs. SUBAGA

KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

LAMPIRAN PERATURAN DESA
HARGOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA
 ATAS PERATURAN DESA
 HARGOREJO NOMOR 1
 TAHUN 2015 TENTANG
 RENCANA
 PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH
 DESA (RPJM DESA)
 PERIODE TAHUN 2015 -
 2020

SISTIMATIKA RPJM DESA

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

- 3.1 Potensi
- 3.2 Masalah

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA

- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.1.1 Visi
 - 4.1.2 Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
 - 4.2.1 Tujuan
 - 4.2.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB IX : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Dari Pedukuhan
7. Daftar Gagasan Pedukuhan
8. Sketsa Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi
9. Kalender Musim Dan Daftar Masalah Dan Potensi
10. Bagan Kelembagaan Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi
11. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
12. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
13. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui MUSDES
14. Rancangan RPJM Desa
15. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
16. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui MUSRENBANGDES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya di masa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju, adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumber daya yang dimiliki desa saat ini perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

Disamping sebagai arah bagi pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat juga digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Hargorejo. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen RPJM Desa tersebut untuk mengetahui program pembangunan desa dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Selain itu, keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat digunakan sebagai gambaran konkrit tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (6 tahun). Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Desa Hargorejo untuk melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran, perencanaan dan berkesinambungan. Dalam hal ini adalah keterkaitan RKP Desa yang merupakan penjabaran tentang RPJM Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran serta DU RKP Desa yang akan diusulkan ke pemerintah yang lebih tinggi.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan maupun peraturan-peraturan terkait lainnya dimaksud supaya perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan-kewenangan desa dan prioritas

program di masing-masing bidang sehingga pembangunan terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara terarah dan berkesinambungan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan karena setiap proses pembangunan yang dicanangkan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah pasti melibatkan peran serta masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dan kemudian pemanfaat dari hasil pembangunan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga sasaran dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Karena yang lebih tahu kebutuhan akan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil-hasil dari pembangunan tersebut tepat mengena pada masyarakat terutama masyarakat miskin, tepat sasaran dan tidak salah perencanaan sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan tempat pembangunan itu digulirkan.

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat memperjelas program dan kegiatan yang menjadi prioritas di masing-masing bidang sehingga memudahkan desa dalam melakukan evaluasi kinerja desa tahunan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Hargorejo didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 -2020;
18. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
19. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hargorejo Tahun 2017; dan

20. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2020 ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo 2005-2025 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2020 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya dan dalam Kebijakan Umum APBDDes setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Setiap tahun akan dilaksanakan review dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, Perangkat Desa, LPMD dan BPD. Sehingga dari hasil review tersebut dapat dijadikan sarana control bagi pelaksanaan pembangunan di desa, termasuk juga di dalamnya mengenai kinerja dan tingkat SDM pelaksanaannya. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi apabila dipandang perlu untuk revisi atau perbaikan datanya, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan – perhitungan. Termasuk di dalamnya dilakukan penyelarasan dengan Dokumen terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan dokumen RPJM Desa Hargorejo sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum

1.4 Hubungan Antar Dokumen

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.2 Demografi

2.1.3 Keadaan Sosial

2.1.4 Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

3.2 Masalah

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

4.2.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB IX : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu desa/daerah. Sejarah Desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos, tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Hargorejo juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini, yang akan kami tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 - 2020 ini.

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul Desa Hargorejo memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariasi, ada beberapa tempat yang dikeramatkan, karena tempat itu memiliki sejarah asal usul berupa cerita rakyat (Folklore) yang dipercayai secara turun temurun.

Wilayah Desa Hargorejo pada mulanya sebelum tahun 1949 adalah 4 (empat) Kalurahan yaitu :

- a. Kalurahan Kokap lama
- b. Kalurahan Selo
- c. Kalurahan Kriyan lama
- d. Kalurahan Penggung lama.

Sekitar kurang lebih tahun 1934 Kalurahan Kokap yang Sekarang wilayahnya meliputi pedukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Tejogan, sebagian Pedukuhan Sangkrek dan Pandu dengan Lurah pertamanya RONO PAWIRO, Lurah yang pernah menjabat sampai dengan tahun 1949 tersebut : RM SASTRODIKROMO, RONO PAWIRO, KARSO PAWIRO dan MANGUNDIHARJO.

Kalurahan Selo yang wilayahnya meliputi Pedukuhan Selo Barat dan Pedukuhan Selo Timur serta sebagian Pedukuhan Sangkrek bagian selatan sekitar tahun 1940 setelah Lurah WIROTARUNO mengakhiri masa tugasnya, salah satu Calon Lurah (NITI KARIYO) dicuret di Karawang sebelum pelaksanaan Pemilihan Lurah, maka pelaksanaan Pemilihan Lurah batal dan

akhirnya bergabung dengan Kalurahan Kriyan yang wilayahnya meliputi Pedukuhan Kriyan Sekarang dan pedukuhan Ngulakan dengan Lurahnya bernama SASTROMIHARDJO.

Kalurahan Penggung lama yang wilayahnya meliputi sebagian Pedukuhan Pandu, Pedukuhan Penggung, Kliripan, Anjir, Krengseng dan Sindon dengan Lurah pertamanya JAELANI. Pada saat kurang lebih satu tahun sebelum terjadinya penggabungan menjadi Kalurahan Hargorejo, Lurah Kalurahan Penggung dijabat oleh SADJIJO WIRJO DIHARDJO.

Seiring pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII yang menyatakan daerah beliau adalah kerajaan yang masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (5 September 1945), sehingga Kalurahan yang merupakan wilayah terkecil dari Kerajaan Ngayogjakartohadiningrat dan Paku Alaman serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri-sendiri karena berbagai hal maka keempat Kalurahan yang ada menggabungkan diri dengan diberi nama Kalurahan Hargorejo dengan Lurah yang pertama kalinya MANGKU PRANOTO yang sebelumnya menjabat sebagai Carik pada saat pemerintahan Lurah MANGUNDIHARJO.

Lurah atau Kepala Desa (sesuai sebutan yang berlaku dengan Peraturan Perundangan yang berlaku) yang pernah memerintah sejak April 1954 tersebut :

Tahun 1949 s/d 1967	: MANGKU PRANOTO
Tahun 14 April 1971 s/d 1972	: R U S L A N
Tahun 1972 s/d 1990	: karena situasi dan kondisi belum diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk sementara dijabat oleh SUTARJO, Sekretaris Desa Hargorejo.
Tahun 9 Januari 1990 s/d 1999	: SUPRAYITNO
Tahun 1999 s/d 2000	: SUTARJO (Penjabat Sementara)
Tahun 2000 s/d 2013	: BHEKTI MURDAYANTO, SE
Tahun 2013 s/d 2014	: KOESDIONO (Pj. Kepala Desa)
Tahun 2014 s/d Sekarang	: ADI PURNOMO

Legenda Desa

Petilasan Sunan Geseng terdapat di pedukuhan Ngulakan, tempat tersebut oleh sebagian penduduk sekitarnya Sangat dikeramatkan, konon katanya barang siapa mempunyai maksud atau kehendak minta lamtaran dari Mbah Pengeranan (sebutan orang yang dikeramatkan disitu), maka

maksud/kehendak tersebut dapat terkabulkan. Tempat tersebut kini telah dibangun, karena setiap tahun di tempat itu diselenggarakan untuk syukuran dengan mengadakan hiburan wayang kulit, konon apabila satu tahun berjalan tidak menyelenggarakan pentas wayang kulit di tempat itu maka di pedukuhan tersebut akan terjadi beberapa musibah yang menimpa penduduk di sekitarnya.

Bangunan di petilasan Sunan Geseng terdiri dari 2 unit, satu unit untuk petilasan itu sendiri, satu unit lagi merupakan gedung kesenian, khususnya wayang kulit. Disamping fungsi gedung untuk penyelenggaraan kesenian, gedung tersebut juga dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan PKK, Posyandu, Balita, musyawarah-musyawarah warga pedukuhan dll.

Adapun cerita Turun temurun yang didapat dari petilasan Sunan Geseng tersebut adalah sebagai berikut :

Pada pertengahan abad ke 18 terutama pasca Perang Diponegoro yaitu perang besar di tanah jawa antara bangsawan Kasultanan Mataram di Yogyakarta bersama para pengikutnya melawan penjajah Belanda, perang tersebut berlangsung tahun 1825 -1830. Perang berakhir dengan kekalahan pihak Pangeran Diponegoro karena akibat kelicikan Belanda. Pengikut setia Pangeran Diponegoro tersebut banyak yang melarikan diri ke daerah-daerah lain guna menghindari kejaran tentara Belanda dan di daerah yang baru mereka menyusun kekuatan kembali atau mengobarkan semangat anti penjajahan Belanda.

Konon salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang datang di Pedukuhan Ngulakan Desa Hargorejo adalah seorang pimpinan dalam perang terhadap tentara Belanda yang bernama Raden Cokro Joyo. Ditempat itu Cokro Joyo menyamar sebagai seorang pemuda yang setiap hari bekerja menderes pohon kelapa atau menyadap nira (nderes).

Pada suatu pagi, ketika Raden Cokro Joyo baru naik ke atas pohon kelapa sambil bernyanyi guna menghilangkan penatnya, lewatlah seorang Waliulloh yakni Sunan Ampel dari Jawa Timur. Sunan ketika mendengar nyanyian Raden Cokro Joyo yang berbunyi :

KLUNTANG KLUNTUNG WONG NDERES BUNTUTE BUMBUNG
OJO MUTUNG, YEN SIRO KEPENGIN UNTUNG
KLUNTANG KLUNTUNG WONG NDERES BUNTUTE BUMBUNG
LAMUN MUTUNG SIRO BAKAL DADI BUNTUNG.

Mendengar nyanyian pemuda tersebut Sunan tersenyum dan berkata dalam hatinya, sebetulnya pemuda ini bukan sembarang pemuda, ternyata dia

mempunyai filsafat untuk mengarungi kehidupan kedepan yang sangat tinggi. Maka dipanggilah pemuda tersebut kemudian diberinya nasehat.

”Hai pemuda, apabila engkau menginginkan penghasilan yang banyak, hasil nira yang melimpah, janganlah bernyanyi seperti yang baru engkau katakana”. Kemudian sang pemuda itu menjawab, ” lalu bagaimana yang harus aku sebutkan ”. Maka sang Sunan menjawabnya : ” apabila kamu menghendaki hajad atau keinginanmu bisa terkabul, bacalah nyanyian atau doa ini :

LA ILAHA ILALLOH MUHAMMADUROSULULLOH

LAKHAULA WALA QUATA ILLA BILLAHII NGALIYIL ADHIM.

“Tidak ada Tuhan yang harus kita sembah, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah “ Pemuda itu sangat senang mendengarkannya dan sanggup untuk mengamalkan nyanyian atau doa tersebut. Maka beberapa hari setelah pemuda tersebut bekerja, sambil berdoa datanglah apa yang diminta. Nira hasil sadapannya selalu melimpah, bumbung-bumbung tempat menampung air nira selalu penuh dan nira-nira yang di olah dijadikan gula jawa selalu baik, berkualitas dan meningkat jumlahnya.

Maka berjanjilah pemuda itu kepada Sunan bahwa ia bersedia akan ikut dengan setia pada Sunan dimanapun ia berada . sunan menerima dan berkata :” Apabila memang engkau setia mengikuti aku, maka tungguilah pusakaku yang berwujud keris ini disini. Aku akan meneruskan perjalananku untuk berdaqwah. Sebelum aku datang ke tempat ini kembali, janganlah engkau pergi-pergi dan jangan memberikan pusaka ini kepada siapapun kecuali kepadaku”.

Sangguplah pemuda itu untuk menunggui pusaka tersebut. Kemudian Sunan pergi dari tempat itu untuk meneruskan berdakwah ke tempat lain. Sunan konon kabarnya meneruskan daqwahnya sampai wilayah Temon dan terakhir di Desa Kalirejo tepatnya diwilayah Kalibuko.

Di Kalibuko Sunan juga sempat meninggalkan petilasan / tempat keramat yang terkenal yaitu bambu larangan. Riwayat dari tempat yang dikeramatkan itu, menurut cerita sewaktu Sunan berbuka puasa ramadhan di tempat itu beliau makan sate. Setelah selesai tusuk sate itu ditancapkan oleh Sunan di tempat itu. Akhirnya bambu tusuk sate tersebut bisa hidup menjadi pohon bambu, hingga sampai sekarang tidak ada orang yang berani menebang atau menggunakan bambu-bambu tersebut, takut terkena balaknya. Maka tempat itu kemudian dinamakan petilasan Bambu Larangan. Tempat itu juga disegani penduduk sekitarnya dan dikeramatkan.

Setelah beberapa lama bahkan bertahun-tahun berdakwah, Sunan teringat akan pusaka yang ditinggalkan di pedukuhan Ngulakan, kemudian beliau menemui Raden Cokro Joyo yang ditugasi untuk menunggu pusakanya. Sesampai di tempat itu, betapa terkejutnya Sunan karena tempat itu sudah berubah menjadi semak belukar yang rimbun. Dicarinya Cokro Joyo kesana kemari namun tidak bisa ketemu, akhirnya samak belukar itu di bakar oleh Sunan, maka keluarlah Cokro Joyo dari dalam semak itu dengan keadaan terbakar, badannya penuh dengan luka bakar. Dalam bahasa Jawa disebut gosong-gosong atau geseng, maka oleh Sunan tempat itu dinamai petilasan Sunan Geseng.

Pusaka dan Raden Cokro Joyo kemudian di ruwat oleh Sunan, maka keduanya sehat kembali dan selanjutnya diajak pulang menuju daerah Magelang. Di Magelang bersama santrinya Cokro Joyo mendirikan Pondok Pesantren yang kemudian hidup dan berkembang sampai sekarang. Dan di Magelang pun ada petilasan Sunan Ampel yang kini dibangun dan dipugar oleh Pemerintah menjadi Obyek Wisata yang besar yaitu petilasan Kyai Langgeng.

2.1.2 Demografi

Keadaan kependudukan di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo menunjukkan mobilitas yang tinggi, hal ini terkait dengan struktur jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Komposisi penduduk dengan makin didominasi oleh kelompok usia produktif menunjukkan *efektivitas* penduduk yang tinggi.

a. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan sumber data profil desa tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian (jumlah penduduk berdasarkan)	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1)	Kelompok Umur			
	1. 1 hari s/d 5 tahun	123	123	123
	2. 5 s/d 10 tahun	113	113	113
	3. 10 s/d 15 tahun	110	110	110
	4. 15 s/d 20 tahun	140	140	140
	5. 20 s/d 25 tahun	131	131	131
	6. 25 s/d 30 tahun	111	111	111

	7. 30 s/d 35 tahun	149	149	149
	8. 35 s/d 40 tahun	124	124	124
	9. 40 s/d 45 tahun	105	105	105
	10. 45 s/d 50 tahun	123	123	123
	11. 50 s/d 55 tahun	124	124	124
	12. 55 s/d 60 tahun	102	102	102
	13. 60 s/d 65 tahun	74	74	74
	14. 65 s/d 70 tahun	44	44	44
	15. 70 s/d 75 tahun	107	107	107
2) Mata Pencaharian				
	1. Petani	909	909	909
	2. Buruh Tani	49	49	49
	3. Buruh Migran	19	19	19
	4. Pegawai Negeri Sipil	40	40	40
	5. Pengrajin	6	6	6
	6. Pedagang barang kelontong	30	30	30
	7. Montir	1	1	1
	8. Perawat swasta	5	5	5
	9. Bidan swasta	1	1	1
	10. TNI	1	1	1
	11. POLRI	2	2	2
	12. Guru swasta	11	11	11
	13. Dosen swasta	2	2	2
	14. Pedagang Keliling	9	9	9
	15. Tukang Kayu	12	12	12
	16. Tukang Batu	21	21	21
	17. Pembantu rumah tangga	6	6	6
	18. Notaris	2	2	2
	19. Karyawan Perusahaan Swasta	189	189	189
	20. Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	1	1
	21. Wiraswasta	495	495	495
	22. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	60	60	60

	23. Belum Bekerja	452	452	452
	24. Pelajar	506	506	506
	25. Ibu Rumah Tangga	335	335	335
	26. Purnawirawan/Pensiunan	25	25	25
	27. Perangkat Desa	6	6	6
	28. Buruh Harian Lepas	214	214	214
	29. Sopir	19	19	19
	30. Tukang Jahit	1	1	1
	31. Karyawan Honorer	4	4	4
	32. Tukang Cukur	1	1	1
	33. Tukang Las	2	2	2
	34. Tukang Listrik	1	1	1
	35. Pemuka Agama	3	3	3
	36. Apoteker	1	1	1
3) Tingkat Pendidikan				
	1. Tamat SMP/ sederajat	499	499	499
	2. Tamat SD/ sederajat	275	275	275
	3. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	0	0	0
4) Pemeluk Agama				
	1. Katholik	94	94	94
	2. Kristen	6	6	6
	3. Islam	3.341	3.341	3.341

Sumber: Profil Desa Tahun 2017 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

- b. Jumlah Keluarga
 - 1) Jumlah Keluarga Menurut Wilayah

No	Nama Pedukuhan	Jumlah KK
1	Gunung Kukusan	168
2	Gunung Rego	199
3	Ngaseman	154
4	Sambeng	209

5	Tejogan	185
6	Sangkrek	174
7	Selo Barat	127
8	Selo Timur	319
9	Kliripan	191
10	Penggung	150
11	Pandu	104
12	Anjir	242
13	Krengseng	154
14	Sindon	197
15	Ngulakan	179
16	Kriyan	353
JUMLAH		3105

2) Jumlah Keluarga menurut PUS dan Akseptor KB

Pelaksanaan program Keluarga Berencana telah mampu menumbuhkan kesadaran bagi para keluarga untuk melaksanakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), bahkan telah menjadi bagian dalam tata kehidupan di masyarakat. Hal ini tercermin dari kecilnya angka rata-rata jumlah anak dalam keluarga, tingginya angka kesertaan KB, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat partisipasi/peran serta masyarakat atau keluarga dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana.

JUMLAH KELUARGA MENURUT PUS DAN AKSEPTOR KB
WILAYAH DESA HARGOREJO TAHUN 2015

NO	BULAN	PUS	JUMLAH PESERTA KB						
			KONDOM	PIL	SUNTIK	IMPLAN	IUD	MOP	MOW
1	JANUARI	1371	23	83	318	115	114	2	45
2	FEBRUARI	1434	23	105	293	115	96	-	24
3	MARET	1201	21	86	263	100	102	2	17
4	APRIL	1289	25	95	333	127	115	2	25
5	MEI	1111	26	95	324	103	114	2	24
6	JUNI	1394	24	94	324	104	114	2	24
7	JULI	1280	26	95	325	105	115	2	22
8	AGUSTUS	1066	26	95	334	131	116	2	25
9	SEPTEMBER	1133	26	94	308	153	119	4	639
10	OKTOBER	1436	22	107	345	108	116	2	25
11	NOPEMBER	1356	26	92	282	129	113	2	24
12	DESEMBER	1400	25	90	278	135	116	2	23
	JUMLAH	15471	293	1.131	3.727	1.425	1.350	24	917

Sumber: Kasi Kemasyarakatan Desa (Rekapitulasi data hasil kegiatan
posyandu wilayah Desa Hargorejo Tahun 2015)

JUMLAH KELUARGA MENURUT PUS DAN AKSEPTOR KB
WILAYAH DESA HARGOREJO TAHUN 2016

NO	BULAN	PUS	JUMLAH PESERTA KB						
			KONDOM	PIL	SUNTIK	IMPLAN	IUD	MOP	MOW
1	JANUARI	1142	22	83	342	136	107	0	27
2	FEBRUARI	1140	22	78	248	108	94	4	22
3	MARET	1152	36	89	339	125	111	2	32
4	APRIL	943	35	89	340	120	112	2	25
5	MEI	1222	34	83	360	118	106	2	24
6	JUNI	1161	27	87	341	104	108	2	23
7	JULI	1186	28	86	345	115	108	2	23
8	AGUSTUS	1110	29	86	347	115	110	2	22
9	SEPTEMBER	1117	27	125	316	114	108	2	23
10	OKTOBER	1157	29	84	350	116	112	2	22
11	NOPEMBER	1193	29	90	337	120	112	2	21
12	DESEMBER	1136	53	100	318	122	121	2	26
	JUMLAH	13659	371	1080	3983	1413	1309	24	290

Sumber: Kasi Kemasyarakatan Desa (Rekapitulasi data hasil kegiatan
posyandu wilayah Desa Hargorejo Tahun 2016)

- c. Angkatan Kerja
- 1) Jumlah Penduduk Usia Kerja

JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	15 - 19 tahun	461	341	802
2	20 - 24 tahun	475	332	807
3	25 - 29 tahun	379	258	637
4	30 - 34 tahun	481	346	827
5	35 - 39 tahun	432	354	786
6	40 - 44 tahun	364	354	718
7	45 - 49 tahun	364	375	739
8	50 - 54 tahun	362	304	666
9	55 - 59 tahun	201	170	371
10	60 - 65 tahun	199	156	355
	JUMLAH	3718	2990	6708

2) Jumlah Penduduk Bekerja menurut Pendidikan

JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD	36	50	86
2	SD	884	703	1587
3	SLTP	1035	829	1864
4	SLTA	1394	1152	2546
5	Diploma (D1 S/d - D3)	172	138	310
6	D4 dan Sarjana (S1 s/d S3)	197	118	315
	Jumlah	3718	2990	6708

3) Jumlah Penduduk Bekerja menurut Jenis Pekerjaan

JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN KERJA

NO	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sektor pertanian	2714	2083	4797
2	Sektor pertambangan dan Pengalian	44		44
3	Industri	83	363	446
4	Listrik Gas , Air	32		32
5	Bangunan / Kontruksi	273	14	287
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	70	73	143
7	Transportasi, Pengangkutan dan Komunikasi	48	15	63
8	Keuangan , Persewaan dan Jasa Perusahaan	86	54	140
9	Jasa lainnya (jasa Perseorangan Masyarakat , Sosial)	132	102	234
	JUMLAH	3482	2704	6186

4) Jumlah Penduduk Tidak Bekerja menurut Usia dan Pendidikan

JUMLAH PENGANGGUR MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	15 - 19 tahun	23	24	47
2	20 - 24 tahun	26	25	51
3	25 - 29 tahun	24	34	58
4	30 - 34 tahun	22	30	52
5	35 - 39 tahun	22	34	56
6	40 - 44 tahun	24	25	49
7	45 - 49 tahun	26	34	60
8	50 - 54 tahun	28	32	60
9	55 - 59 tahun	23	26	49
10	60 - 65 tahun	18	22	40
	JUMLAH	236	286	522

JUMLAH PENGANGGUR MENURUT PENDIDIKAN

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD	23	21	44
2	SD	55	89	144
3	SLTP	67	82	149
4	SLTA	52	63	115
5	Diploma (D1 S/d - D3)	20	19	39

6	D4 dan Sarjana (S1 s/d S3)	19	12	31
	Jumlah	236	286	522

Sumber data: Data kependudukan dan ketenagakerjaan Program PKPTK
Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015)

2.1.3 Keadaan Sosial

a. Agama

Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama

NO	DUSUN	ISLAM		KRISTEN		KATHOLIK		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	Gunung kukusan	294	263	-	-	35	59	651
2	Gunung rego	356	331	-	2	12	14	715
3	Ngaseman	293	230	-	-	56	67	646
4	Sambeng	410	420	-	-	63	46	939
5	Tejogan	245	319	-	-	65	47	676
6	Sangkrek	336	333	-	-	23	14	706
7	Selo Barat	255	266	-	-	-	-	521
8	Selo Timur	542	481	1	2	-	-	1026
9	Kliripan	319	351	3	2	-	-	675
10	Pandu	229	206	-	1	-	-	436
11	Anjir	405	372	28	15	2	3	825
12	Penggung	315	318	-	-	-	-	633
13	Krengseng	291	299	10	8	-	-	608
14	Sindon	340	350	8	9	-		707
15	Ngulakan	269	297	42	48	9	9	674
16	Kriyan	542	551	10	12	-	-	1115
	Jumlah	5441	5387	102	99	265	259	11553

Sumber data: Data kependudukan dan ketenagakerjaan Program PKPTK
Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015)

b. Kesehatan Masyarakat

1) Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan

NO	BULAN	JUMLAH SASARAN POSYANDU													JUMLAH BAYI				JUMLAH KEMATIAN				
		BAYI 0 - 5 BULAN		BAYI 6 - 11 BULAN		ANAK 12 - 23 BULAN		ANAK 24 - 59 BULAN		WUS	IBU				LAHIR		MATI		ANAK BALITA		BUMIL	MELAHIRKAN	NIFAS
		L	P	L	P	L	P	L	P		PUS	HAMIL BARU	NIFAS BARU	MENYUSUI BARU	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	JANUARI	14	25	26	24	71	50	182	211	774	1371	21	32	158	11	4	0	0	0	0	0	0	1
2	FEBRUARI	12	19	28	28	71	47	195	215	773	1434	41	17	169	3	2	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	14	16	23	33	72	46	185	206	775	1201	23	22	164	3	1	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	18	14	25	34	67	46	187	203	725	1289	20	1	181	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	21	14	26	29	55	59	148	205	697	1111	440	28	127	76	3	0	0	1	0	0	0	0
6	JUNI	21	22	19	29	55	43	199	192	781	1394	21	9	203	5	3	0	0	0	0	0	0	1
7	JULI	25	16	25	30	58	49	193	237	840	1280	18	37	168	5	3	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	27	16	23	27	54	56	171	214	785	1066	103	36	168	2	4	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	29	27	23	21	61	61	166	224	814	1133	97	2	206	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	25	28	23	18	59	57	183	175	683	1436	104	13	210	22	4	0	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	25	26	25	18	58	62	185	171	784	1356	88	10	224	9	3	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	27	29	23	21	54	61	183	171	802	1400	21	7	232	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	15471										976	182	2052	130	29	0	0	1	0	0	0	2

Sumber: Kasi Kemasyarakatan Desa (Rekapitulasi data posyandu Desa Hargorejo Tahun 2015

NO	BULAN	JUMLAH SASARAN POSYANDU													JUMLAH BAYI				JUMLAH KEMATIAN				
		BAYI 0 - 5 BULAN		BAYI 6 - 11 BULAN		ANAK 12 - 23 BULAN		ANAK 24 - 59 BULAN		WUS	IBU				LAHIR		MATI		ANAK BALITA		BUMIL	MELAHIRKAN	NIFAS
		L	P	L	P	L	P	L	P		PUS	HAMIL BARU	NIFAS BARU	MENYUSUI BARU	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	JANUARI	25	30	30	21	52	54	192	182	666	1142	22	37	181	3	1	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	28	24	32	28	46	56	196	180	672	1140	39	38	189	3	2	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	29	22	31	31	42	52	198	177	652	1152	12	12	212	1	6	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	19	27	35	70	43	60	180	284	590	943	9	24	192	1	1	0	1	0	1	0	0	0
5	MEI	27	28	31	43	45	54	200	181	864	1222	7	24	206	3	6	0	0	40	28	0	0	5
6	JUNI	38	30	33	40	43	48	203	179	712	1161	91	40	180	14	2	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	35	26	30	37	51	53	200	172	850	1186	85	39	195	1	3	0	0	1	0	0	0	0
8	AGUSTUS	21	23	32	27	53	49	202	181	731	1110	78	8	234	7	3	1	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	26	22	27	33	59	61	192	217	659	1117	100	34	189	18	2	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	20	19	35	45	59	68	192	281	898	1157	19	6	241	2	3	0	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	15	17	31	30	56	62	181	164	868	1193	62	37	195	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	13	18	33	30	57	68	188	170	813	1136	14	53	187	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	13659										538	352	2401	58	31	1	1	41	29	0	0	5

Sumber: Kasi Kemasyarakatan Desa (Rekapitulasi data posyandu Desa Hargorejo Tahun 2016)

Berikut status gizi

		JUMLAH BALITA SASARAN POSYANDU (S)		YANG PUNYA KMS (k)		JUMLAH BALITA DITIMBANG (D)		YANG NAIK (N)		STATUS GIZI								ASI EKSLUSIF										PMT PEMULIHAN		
										LEBIH		BAIK		KURANG		BURUK		0 - 1 (BLN)		1 - 2 (BLN)		2 - 3 (BLN)		3 - 4 (BLN)		4 - 5 (BLN)				5 - 6 (BLN)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JANUARI	293	292	293	287	194	215	108	92	4	18	165	146	15	6	0	3	3	1	2	5	3	2	2	6	2	4	3	0	0
2	FEBRUARI	265	258	264	253	204	192	73	62	4	30	147	129	14	10	0	2	4	2	4	5	1	3	1	3	2	2	3	8	0
3	MARET	299	280	292	279	238	210	83	68	39	50	196	97	17	12	2	1	2	5	8	2	3	1	3	7	4	1	0	2	0
4	APRIL	266	269	266	268	203	210	85	96	1	25	151	118	11	9	0	0	2	3	1	1	4	0	1	5	4	4	2	3	0
5	MEI	318	295	317	294	235	217	95	84	2	10	174	161	7	12	0	0	2	4	3	2	3	5	3	2	1	1	3	1	0
6	JUNI	311	296	310	274	201	185	92	96	2	18	161	138	9	5	2	0	1	5	2	2	6	4	2	5	4	2	4	2	0
7	JULI	303	301	302	291	198	186	88	98	4	26	166	119	9	5	2	0	1	2	2	5	1	1	6	3	2	4	4	2	1
8	AGUSTUS	410	287	310	283	239	211	87	99	4	34	179	147	6	7	0	0	3	1	2	4	3	2	1	4	2	6	3	0	1
9	SEPTEMBER	301	296	303	290	211	201	79	93	4	21	143	155	5	5	2	2	4	3	3	2	0	2	4	4	3	2	4	3	0
10	OKTOBER	311	310	310	315	223	214	115	94	16	50	155	124	15	11	0	0	2	2	3	3	4	1	2	1	4	4	1	2	1
11	NOPEMBER	269	299	294	293	250	242	86	70	17	26	154	168	36	9	3	1	1	3	0	1	3	2	4	4	1	1	1	3	0
12	DESEMBER	298	287	294	286	257	232	132	121	21	39	182	140	7	9	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	4	4	3	0	1
	JUMLAH	3644	3470	3555	3413	2653	2515	1123	1073	118	347	1973	1642	151	100	11	9	26	32	31	34	32	24	31	45	33	35	31	26	4

2) Perilaku hidup bersih

Adanya kader kesehatan dan penyelenggaraan perilaku hidup bersih meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Diantaranya adalah dengan adanya Deklarasi Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Deklarasi Kawasan Bebas Asap Rokok (Kabar), Program Jambanisasi, Program Bedah Rumah dan Program Lantainisasi, Gerakan Kesadaran Cuci Tangan dengan sabun serta pengolahan limbah keluarga dalam kegiatan Desa Siaga; Pembangunan rintisan Bank Sampah; Pembersihan Daerah Aliran Sungai; Penertiban Pembuangan Sampah di area Pasar Desa.

c. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

1) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Konflik yang terjadi ada 4 jenis, yaitu:

(1) Konflik pertanahan

Kebanyakan karena terkait masalah warisan/ sengketa kepemilikan/sengketa batas, yang sebagian besar dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan dimediasi dari Perades. Segaian kecil ada yang sampai di pengadilan agama/ diselesaikan secara hukum Islam

(2) Konflik rumah tangga

Terjadi karena (masah perselingkuhan, anak yang berani pada orang tua, hamil diluar nikah, istri di LN), yang biasanya diselesaikan dengan musyawarah di medisi perades dan aparat keamanan dan juga ada yang sampai ke Pengadilan Agama

(3) Konflik pencurian

Sebagian besar pencurian tidak bisa diungkap selam kurun waktu 2014-2017 terjadi 10 kali yang diungkap 3 kasus, solusinya di laporkan pada aparat keamanan dan himbauan pada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada

(4) Konflik social

Terjadi karena adanya penambangan legal dan illegal; adanya pembangunan fisik; illegal logging; peredaran minuman keras, narkoba, judi terselubung

2. Pelembagaan sistem keamanan lingkungan

Adanya program dari instansi tertentu untuk pembentukan lembaga terkait pencegahan keamanan lingkungan (FKPM dari Polri, Jaga Warga dari Kesbangpol DIY, Linmas di Desa).

d. Kedaulatan Politik Masyarakat

1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Penyediaan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, partisipasi dalam kegiatan pembangunan berarti kesempatan untuk meningkatkan keikutsertaan, keberdayaan dan bagi pemerintah partisipasi masyarakat berarti penghematan anggaran. Pelaksanaan program dana pembangunan desa di Desa Hargorejo menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan besaran kontribusi masyarakat. Ini dapat dijadikan cerminan dari tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat.

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan, material.

Desa Hargorejo yang berada pada topografi pegunungan dan perbukitan memiliki karakter tersendiri dalam swadaya masyarakatnya. Tingkat kemiskinan menjadi kendala bagi swadaya bentuk pendanaan. Sebaliknya, beberapa material bangunan seperti pasir dan batu kali terdapat di sebagian wilayah dan menjadi bentuk partisipasi masyarakat untuk mendukung setiap pembangunan infrastruktur. Selain itu, swadaya tenaga juga menjadi alternatif utama di saat pendanaan minim dan material sulit didapat di sebagian wilayah.

Data yang terhimpun di Bagian Pembangunan Desa selama kurun waktu tahun 2015-2017 mencatat partisipasi masyarakat sebagai bentuk swadaya dalam pembangunan cukup besar sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tahun	Dana yang masuk untuk desa (Rp)	Swadaya masyarakat (Rp)
2015	4.877.215.310	204.430.000
2016	2.846.762.455	645.758.000
2017 sd. Bln Oktober	2.657.600.300	197.896.500

Sumber: Data Kasi Pembangunan Desa

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan dana yang masuk ke desa dari berbagai sumber, baik itu dana transfer maupun dana APBD dan APBN dalam bentuk kegiatan dari tahun 2015-2017 dan swadaya masyarakat yang telah diuangkan. Ada keseimbangan dalam hal ini, antara tahun 2015 dengan tahun 2016. Tahun 2015, dana yang masuk ke desa lebih banyak daripada tahun 2016, namun swadaya masyarakatnya lebih kecil dari tahun 2016. Demikian sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebetulnya sangat antusias untuk memberikan swadaya dalam pembangunan dengan adanya stimulan dari pemerintah.

2) Adat istiadat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Hargomulyo masih memegang teguh adat-istiadat warisan nenek moyang misalnya dalam bentuk gotong royong, rewang, sambatan, nyumbang dan jagong acara kelahiran bayi. Adat yang berhubungan dengan kepercayaan antara lain : kenduri sedekah, pada bulan tertentu diadakan saparan, mauludan, ruwahan, puasa.

Selain itu masyarakat juga masih melaksanakan adat yang berhubungan dengan kelahiran dan perkawinan misalnya upacara brokohan, sepasaran, selapanan, supitan, timangan, tetesan, nglamar, asok tukon, mantu, boyongan, tingkeban, ruwat, dan adat yang berhubungan dengan kematian misalnya: telung dina (3hari), pitung dina (7 hari), patang puluh dina (40 hari), satus dino (100 hari), setahun, sewu dina (1000) hari, ngijing dll.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

a. Pengangguran

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam table berikut :

JUMLAH PENGANGGUR MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	15 - 19 tahun	23	24	47
2	20 - 24 tahun	26	25	51
3	25 - 29 tahun	24	34	58
4	30 - 34 tahun	22	30	52
5	35 - 39 tahun	22	34	56
6	40 - 44 tahun	24	25	49
7	45 - 49 tahun	26	34	60
8	50 - 54 tahun	28	32	60
9	55 - 59 tahun	23	26	49
10	60 - 65 tahun	18	22	40
	JUMLAH	236	286	522

JUMLAH PENGANGGUR MENURUT PENDIDIKAN

NO	KETERANGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD	23	21	44
2	SD	55	89	144
3	SLTP	67	82	149
4	SLTA	52	63	115
5	Diploma (D1 S/d - D3)	20	19	39
6	D4 dan Sarjana (S1 s/d S3)	19	12	31
	Jumlah	236	286	522

Dari table dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan di Desa Hargorejo sejumlah 522 orang.

Sumber data: Data kependudukan dan ketenagakerjaan Program PKPTK Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015)

b. Kesejahteraan Keluarga

Laju perkembangan kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari data dalam Album Kemiskinan berikut data dari tahun 2014 s/d tahun 2016:

NO	TAHUN	HAMPIR MISKIN	MISKIN	SANGAT MISKIN
1	2014	856	435	138
2	2015	905	361	135
3	2016	1.138	385	167

c. Pendapatan perkapita dan PDDB Desa

Pendapatan per kapita di Desa Hargorejo masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh upah pekerja yang rendah dan masih banyaknya pengangguran. Berdasarkan data penduduk berdasarkan usia untuk jumlah masyarakat usia produktif tinggi serta banyaknya program pelatihan dan penyuluhan baik dari pemerintah maupun swasta merupakan potensi yang dapat dikembangkan

untuk membuka peluang usaha ditambah adanya bantuan pinjaman modal untuk usaha. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah buruh tani dan penderes.

d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat

Desa Hargorejo memiliki 2 buah pasar desa yaitu pasar Kokap dan Pasar Sidodadi. Seiring perkembangan pasar Kokap yang telah mendapat bantuan pembangunan dari Kementerian Koperasi di Tahun 2015 berdasarkan peraturan desa maka diperoleh kesepakatan bagi hasil sebesar 40% dari hasil bersih. Selain itu juga ada 8 kios desa yang disewakan kepada masyarakat.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Desa dari 87 Desa 1 Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Timur	:	Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih
Barat	:	Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap
Utara	:	Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap
Selatan	:	Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih.

Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 500 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 251 – 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Pedukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Pandu, Tejogan dan Pedukuhan Sangkreng. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 51 – 250 meter di atas permukaan air laut, meliputi Pedukuhan Selo Timur, Selo Barat, Anjir, Penggung dan Kliripan , wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 50 meter di atas permukaan air laut, meliputi Pedukuhan Kriyan, Krengseng, Ngulakan dan Pedukuhan Sindon.

Luas wilayah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo adalah 154.34576 hektar, secara administratif terbagi menjadi 16 Pedukuhan.

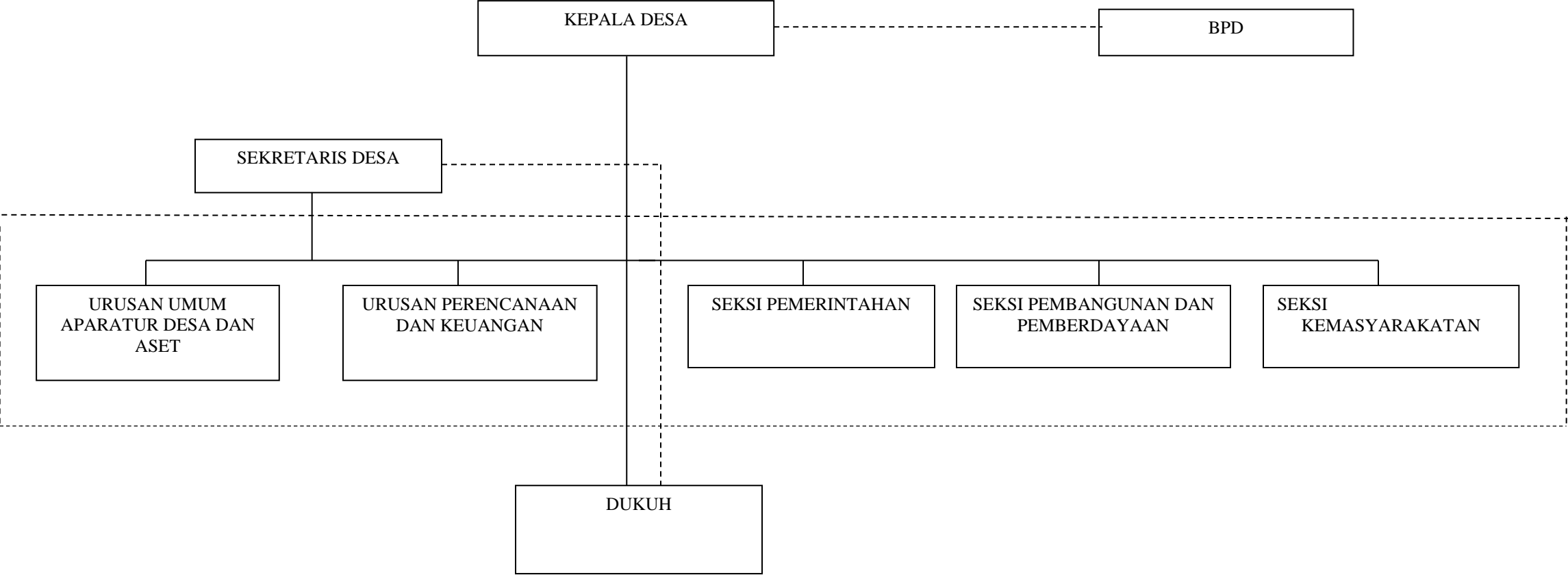
16 Pedukuhan tersebut adalah sbb:

1. Pedukuhan Gunung Kukusan
2. Pedukuhan Gunung Rego
3. Pedukuhan Ngaseman
4. Pedukuhan Sangkrek
5. Pedukuhan Sambeng
6. Pedukuhan Tejogan
7. Pedukuhan Selo Barat
8. Pedukuhan Selo Timur
9. Pedukuhan Kliripan
10. Pedukuhan Penggung
11. Pedukuhan Pandu
12. Pedukuhan Anjir
13. Pedukuhan Krengseng
14. Pedukuhan Sindon
15. Pedukuhan Ngulakan
16. Pedukuhan Kriyan

Penggunaan tanah di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, meliputi sawah 24.6375 Ha (18,30%); pangonan 60.3815 Ha (53,20%); pemukiman umum seluas 28.26730 Ha (5,69%); hutan 2.458587 Ha (1,75%); Hutan rakyat 3.900000 Ha (0,80%); untuk bangunan 65.6030 Ha; tanah tandus 8.24735 Ha (2,09%); tambak 1.500 Ha (0,09%) dan lapangan olah raga 1.5150 Ha.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA HARGOREJO KECAMATAN KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO



Data Pemerintah Desa dan BPD (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

A. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Hargorejo.

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan	Tempat Tanggal Lahir	Surat Pengangkatan Nomor
1.	Adi Purnomo	Kepala Desa	SMA	KP, 14-05-1968	SK Bupati No. 333 Tahun 2014
2.	Siti Nura'eni	Sekretaris Desa	SMK	KP, 26-02-1989	SK Kades No. 27 Tahun 2015
3.	Aprillia Ayu Saputri,SH	Kaur Perencanaan dan Keuangan	S1	KP, 03-04-1993	SK Kades No. 11 Tahun 2017
4.	Suripno Budi Waluyo	Kaur Umum, Aparatur Desa dan Aset	D3	KP, 29-07-1968	SK Kades No. 4 Tahun 2009
5.	Suharyoto	Kasi Pemerintahan	SLTA	KP, 28-01-1976	SK Kades No. 12 tahun 2005
6.	Savira Dwi Cahyani, S.Pd.I,Mm	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	S2	Sampang, 04-03-1983	SK Kades No. 13 tahun 2013
7.	Sukarma	Kasi Kemasyarakatan	SLTA	KP, 10-04-1965	04/KPTS/14 1/1991
8.	Hartono	Staf	SLTA	KP, 30-04-1962	19/KPTS/14 1/1990
9.	Jemadi	Dukuh Gn.Kukusan	SLTA	KP, 20-03-1964	03/KPTS/14 1/1994
10	Repan	Dukuh Gn. Rego	SLTP	KP, 04-11-1959	SK Kades No. 11 Tahun 2007
11.	Jemirin	Dukuh Ngaseman	SLTP	KP, 30-12-1957	SK Kades No. 9 Tahun 2007
12.	Supardi	Dukuh Sambeng	SLTA	KP, 15-10-1976	SK Kades No. 19 tahun 2012
13.	Fauzan	Dukuh Tejogan	SLTA	KP, 25-12-1979	SK Kades No. 21 Tahun 2008

14.	Sakiyan	Dukuh Sangkrek	SLTA	KP, 17-07-1965	SK Kades No. 24 Tahun 2010
15.	Fahrudin	Dukuh Selo Barat	STM	KP, 16-02-1978	SK Kades No. 35 Tahun 2016
16.	R Nur Hidayanto	Dukuh Selo Timur	SLTP	KP, 14-10-1969	SK Kades No. 6 Tahun 2008
17.	Susanto Bambang Sugiyarto	Dukuh Pandu	S1	KP, 30-06-1958	11/KPTS/141/1998
18.	Saifudin	Dukuh Anjir	SLTA	KP, 10-07-1977	SK Kades No. 22 Tahun 2008
19.	Setya Hariyanta	Dukuh Kliripan	SLTA	KP, 01-06-1971	SK Kades No. 5 Tahun 2008
20.	Purwadi	Dukuh Penggung	SLTA	KP, 23-01-1962	08/KPTS/PEM/2002
21.	Rusidi	Dukuh Krengseng	SLTP	KP, 13-02-1970	09/KPTS/PEM/2002
22.	Ahmad Safrudin	Dukuh Kriyan	SLTA	KP, 18-01-1977	SK Kades No. 23 tahun 2010
23.	Sardiyono	Dukuh Ngulakan	SLTP	KP, 05-11-1957	05/KPTS/PEM/2002
24.	Giyono	Dukuh Kriyan	SLTP	KP, 01-04-1954	11/KPTS/PEM/1987

B. Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD Desa Hargorejo)

No	Nama	Jabatan	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.	Drs. Subaga	Ketua	KP, 14-07-1951	Pensiunan PNS	Ngaseman
2.	Sugiyanto, S. Pd	Wakil Ketua	KP, 07-10-1980	Guru	Pandu
3.	Sri Harto	Sekretaris	KP, 16-05-1950	Pensiunan PNS	Kriyan
4.	Sadiman	Anggota	KP, 15-07-1951	Pensiunan PNS	Gunung Kukusan
5.	Wakiran Syamsul Hadi	Anggota	KP, 29-03-1952	Wiraswasta	Tejogan
6.	H. Sumanto, BA	Anggota	KP, 15-16-1943	Pensiunan PNS	Sambeng

7.	Surahmad	Anggota	KP, 24-08-1972	Wiraswasta	Selo Timur
8.	Suwardi	Anggota	KP, 15-01-1969	Swasta	Kliripan
9.	Harjo Sumarto	Anggota	KP, 01-05-1949	Petani	Nganjir
10.	Drs. Sujiran	Anggota	KP, 13-07-1967	Guru	Sindon
11.	Widianto, Amd	Anggota	KP, 04-01-1980	Wiraswasta	Ngulakan

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

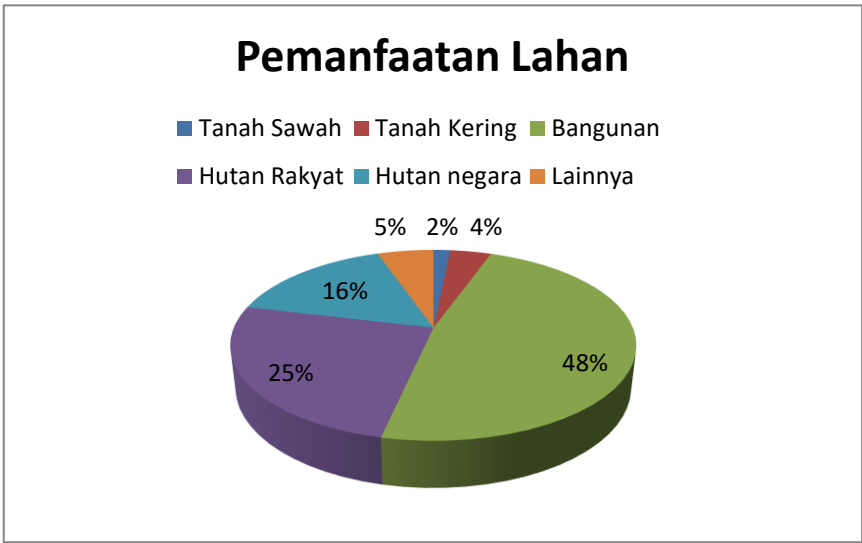
3.1. Potensi

Berdasarkan hasil pengkajian di Desa Hargorejo memiliki potensi yang cukup beragam dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya.

A. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah menurut penggunaan :

- 1. Tanah sawah : 24,64 Ha
- 2. Tanah kering : 60,32 Ha
- 3. Bangunan : 740,16 Ha
- 4. Hutan Rakyat : 390,00 Ha
- 5. Hutan Negara : 245,86 Ha
- 6. Lainnya : 82,47 Ha



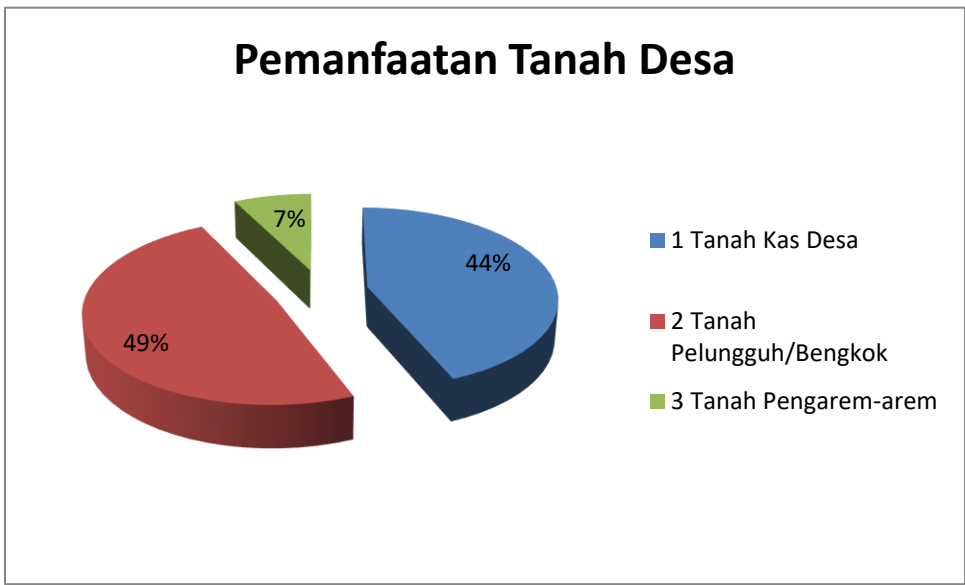
Luas Total : 1.543,45 Ha

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairan

- 1. Sistem Pengairan Teknis : 101 Ha
- 2. Setengah Teknis : -
- 3. Sederhana : -
- 4. Tadah Hujan : -

Pemanfaatan Tanah Desa sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa Terdiri dari :

- 1) Tanah Kas Desa : 18,9975 Ha
- 2) Tanah Bengkok / Pelungguh : 21,1226 Ha
- 3) Tanah Pengarem-arem : 3,2473 Ha



Tanah lain yang dikelola Pemerintah Desa yaitu Tanah Sultan Ground (SG)

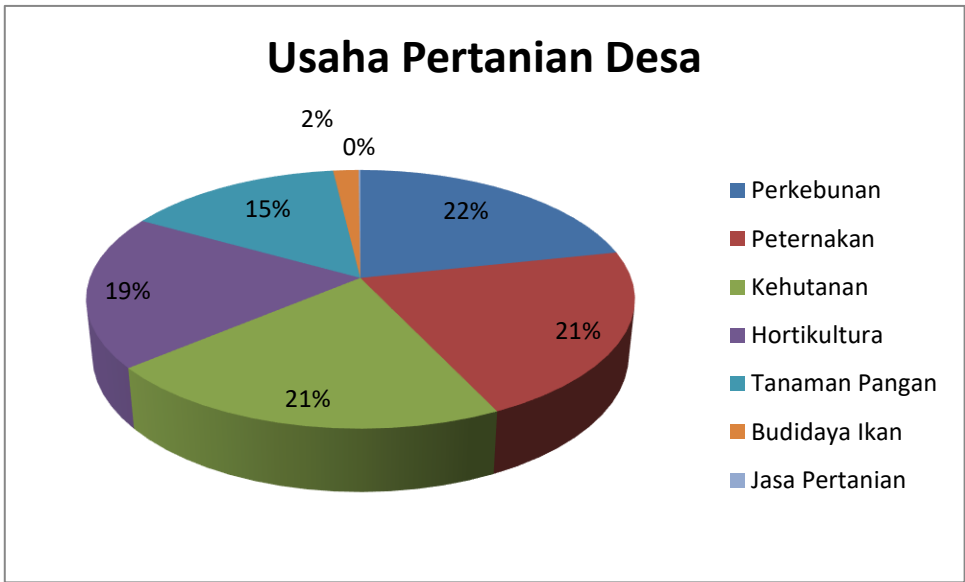
Yaitu sejumlah : 254,4108 Ha

Yang pemanfaatannya untuk :

- 1) Masyarakat : 2,38 Ha
- 2) Desa : 0,99 Ha
- 3) Gereja : 0,34 Ha
- 4) Kehutanan DIY : 17,63 Ha
- 5) Kuburan : 3,77 Ha
- 6) Kantor SKPD : 0,3 Ha
- 7) Pasar Desa : 0,17 Ha
- 8) Hutan Negara : 245, 86 Ha
- 9) Kebun Buah Desa : 1,25 Ha
- 10) Lapangan Desa : 0,8 Ha
- 11) Gedung Balai Dusun : 0,74 Ha

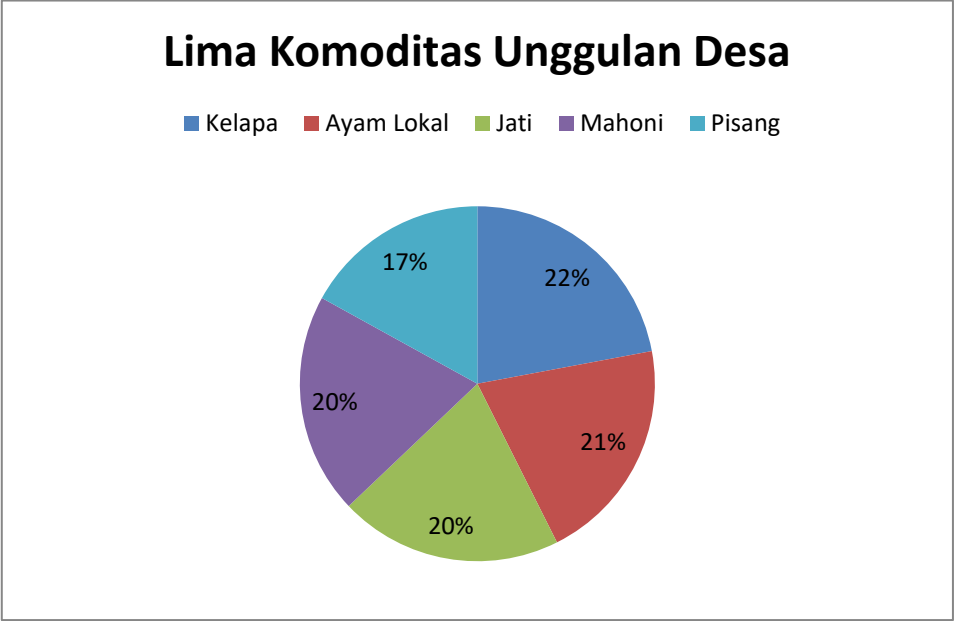
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor (Rumah Tangga) :

- 1) Perkebunan : 1.845 rumah tangga
- 2) Peternakan : 1.813 rumah tangga
- 3) Kehutanan : 1.789 rumah tangga
- 4) Hortikultura : 1.639 rumah tangga
- 5) Tanaman Pangan : 1.277 rumah tangga
- 6) Budidaya ikan : 150 rumah tangga
- 7) Jasa Pertanian : 10 rumah tangga



Lima Komoditas Unggul Desa :

- 1) Kelapa : 1.838 rumah tangga
- 2) Ayam Lokal : 1.712 rumah tangga
- 3) Jati : 1.692 rumah tangga
- 4) Mahoni : 1.677 rumah tangga
- 5) Pisang : 1.415 rumah tangga



- Potensi Wisata :
- 1) Kuliner Produk Lokal Se-Desa Hargorejo
 - 2) Kebun Buah Desa Komoditas Durian Menoreh Pedukuhan Sangkrek
 - 3) Bumi Perkemahan Pedukuhan Anjir
 - 4) Geo Heritage Bekas Tambang Mangan Pedukuhan Kliripan
 - 5) Tuk Mudal Pedukuhan Anjir

B. Potensi Sumber Daya Manusia

JUMLAH PENDUDUK

- 1) Jumlah Laki-Laki : 5.815 jiwa
- 2) Jumlah Perempuan : 5.753 jiwa
- 3) Jumlah Total Penduduk : 11.568 jiwa
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 3.105 KK
- 5) Kepadatan Penduduk : 749, 5 per km²

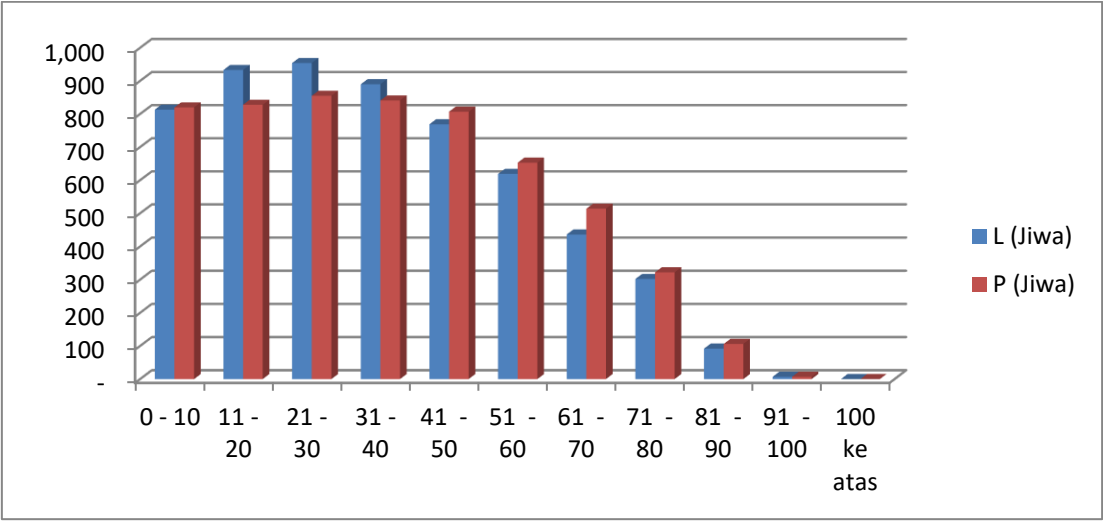
Jumlah Kepala Keluarga Per-Pedukuhan :

No	Nama Pedukuhan	Jumlah KK
1	Gunung Kukusan	168
2	Gunung Rego	199
3	Ngaseman	154
4	Sambeng	209
5	Tejogan	185
6	Sangkrek	174
7	Selo Barat	127
8	Selo Timur	319

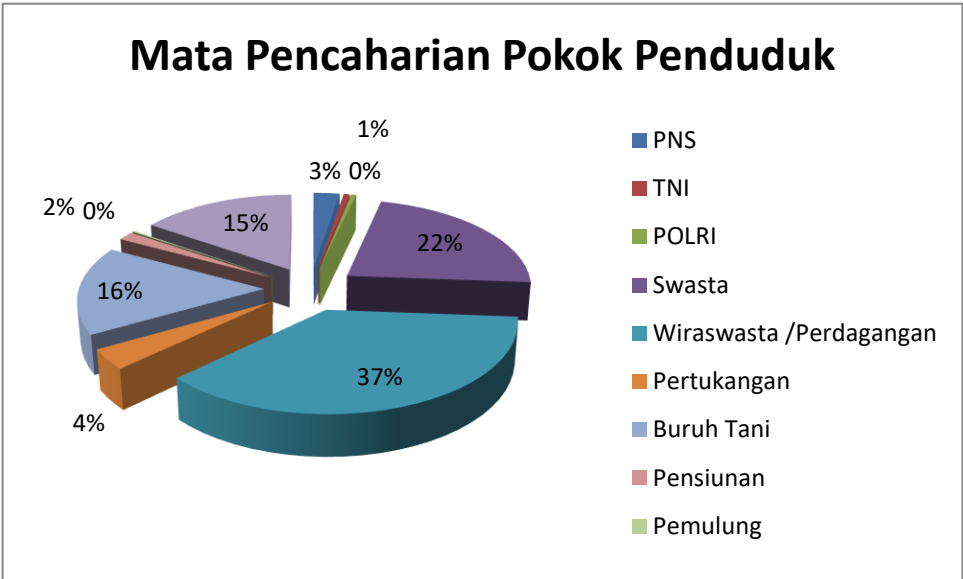
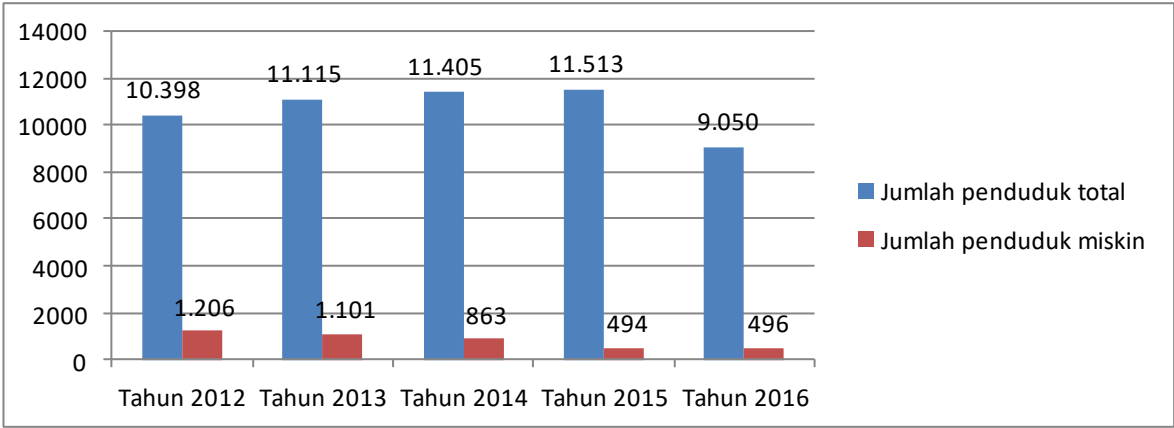
9	Kliripan	191
10	Penggung	150
11	Pandu	104
12	Anjir	242
13	Krengseng	154
14	Sindon	197
15	Ngulakan	179
16	Kriyan	353
JUMLAH		3105

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

RENTANG USIA (Tahun)			L (Jiwa)	P (Jiwa)	Jumlah L + P
0	-	10	813	820	1.633
11	-	20	933	828	1.761
21	-	30	954	855	1.809
31	-	40	890	841	1.731
41	-	50	769	807	1.576
51	-	60	619	653	1.272
61	-	70	436	514	950
71	-	80	302	322	624
81	-	90	92	106	198
91	-	100	7	7	14
100 ke atas			-	-	-
JUMLAH			5.815	5.753	11.568



Grafik Perkembangan Rumah Tangga Miskin (RTM)
(Data Per- tanggal 31 Desember 2016 Sumber Album Kemiskinan Tahun 2017)



C. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Kondisi jalan beraspal di Desa Hargorejo pada akhir Tahun 2017 cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa ruas Jalan Desa yang kondisinya memprihatinkan sepanjang lebih dari 1,5 kilometer. Sedang untuk jalan dusun 75 % dalam kondisi baik, sisanya belum dicorbeton.

D. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Berikut data-data Kebudayaan yang ada di Desa Hargorejo antara lain :

1. Kegiatan adat dan tradisi
 - a. Merti Dusun
 - b. Ruwahan
 - c. Selikuran
 - d. Suran
 - e. Muludan

- f. Khitanan
 - g. Tedak siti
 - h. Peringatan Kematian
 - i. Pernikahan
 - j. Tingkeban
 - k. Wiwit
 - l. Baritan
- 2. Kesenian dan permainan rakyat
 - a. Angguk Putri
 - b. Incling Campur sari
 - c. Jathilan
 - d. Kelompok Karawitan
 - 3. Permainan Rakyat
 - a. Gobak Sodor
 - 4. Kelompok Macapatan

3.2. Masalah

3.2.1. Permasalahan dan Potensi Dari Kalender Musim

Pada penyusunan RPJM Desa Hargorejo ini pada tabel kalender musim tanda centang menunjukkan seberapa kuat intensitas masalah tersebut terjadi pada suatu bulan tertentu. Semakin banyak centang menunjukkan semakin tinggi tingkat intensitas masalah tersebut terjadi pada bulan tertentu. Bila pada bulan lainnya tidak terdapat tanda centang, hal itu menunjukkan masalah itu tidak terjadi pada bulan tersebut.

Tabel 3.1. Kalender Musim (Terlampir)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa masalah yang timbul terkait dengan adanya musim baik itu musim kemarau, musim penghujan, maupun musim pancaroba. Masalahnya antara lain adalah sebagai berikut : Menyusutnya debit air pada musim kemarau. Menyusutnya air disebabkan karena rendahnya intensitas curah hujan pada musim kemarau. Akibatnya pada musim kemarau air untuk irigasi sangat kurang. Hal tersebut berpengaruh pada sektor pertanian karena air sangat dibutuhkan untuk pengairan sawah. Selain itu kekeringan menyebabkan tanah sulit untuk ditanami.

Disamping itu karena minimnya suplai air pada musim kemarau untuk tanaman pertanian menyebabkan sering terjadinya kemerosotan hasil panen pada musim kemarau dan jika sudah sampai pada level yang sangat parah bisa terjadi

kegagalan panen. Kualitas pakan ternak yang berasal dari tumbuhan juga menurun pada musim kemarau karena kekurangan suplai air.

Sektor perikanan pun tidak lepas dari masalah keterbatasan air ketika musim kemarau. Akibatnya pada musim kemarau terjadi kurangnya suplai air untuk pemeliharaan perikanan air tawar.

Pada musim pancaroba, masalah yang terjadi berbeda dengan masalah yang terjadi pada musim kemarau. Pada musim pancaroba bibit penyakit dan serangga yang merugikan manusia berkembang dan dapat menimbulkan penyakit. Meskipun demikian, Desa Hargorejo bukan merupakan desa dengan penyakit endemik tertentu. Selain itu pada saat pancaroba/pertengahan musim tanam kadang tanaman padi yang sudah mulai berisi sering diserang hama tikus sehingga mengakibatkan penurunan bahkan gagal panen. Selain penggalan masalah dengan menggunakan metode kalender musim, perlu juga dilakukan penggalan potensi terkait dengan masalah tersebut untuk mengetahui potensi apa yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Masalah dan Potensi Kalender Musim (Terlampir)

Kebanyakan masalah pada musim kemarau terkait pada kurangnya air baik untuk kegiatan di sektor pertanian, perikanan maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Kurangnya air untuk pertanian kadang menyebabkan gagal panen atau jumlah panen yang merosot baik panen dibidang pertanian maupun perikanan. Musim kemarau juga menyebabkan menurunnya kualitas pakan ternak yang berasal dari tumbuhan karena kekurangan suplai air.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digali pula potensi-potensi yang ada. Potensi yang ada di Desa Hargorejo harus diberdayakan semaksimal mungkin agar potensi ini dapat dimanfaatkan sesuai tujuan. Beberapa potensi yang telah ada diantaranya adalah adanya sarana prasarana irigasi yang memadai.

Swadaya tenaga masyarakat dan partisipasi masyarakat juga tinggi untuk membangun daerahnya. Hal-hal tersebut merupakan suatu modal pembangunan yang cukup potensial untuk dikembangkan guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Dinas penyuluhan dan PPL merupakan pihak yang membantu dalam memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada para petani untuk dapat bekerja dengan lebih baik.

3.2.2 Identifikasi/Penggalian

Dari berbagai metode tersebut, maka didapatkan berbagai potensi dan permasalahan yang ada di Desa Hargorejo sebagai berikut :

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan simbol dari Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan merupakan SDM yang berkualitas. Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan, terutama menyangkut masalah biaya sekolah. Sehingga dilema pendidikan sering dialami oleh penduduk tingkat bawah. Selain karena faktor biaya, masih banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan sampai pada tingkat atas bukan merupakan hal yang penting, sehingga banyak orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini kemudahan memunculkan permasalahan pengangguran, karena sebenarnya mereka merupakan usia produktif. Banyak dari mereka yang hanya bekerja seadanya, banyak diantaranya hanya menjadi buruh lepas. Masalah pendidikan yang rendah ini juga berpengaruh terhadap jiwa kewirausahaan. Semakin minim pendidikan seseorang, maka biasanya jiwa kewirausahaannya juga semakin rendah, sehingga sangat sulit untuk membangun perekonomian. Bidang pendidikan merupakan bagian dari RPJMDes karena pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan berbagai persoalan mengenai aspek pendidikan. Secara makro, kondisi pendidikan masyarakat di Desa Hargorejo sudah cukup baik. Namun secara mikro bidang pendidikan di Desa Hargorejo masih mempunyai banyak masalah. Sebagian besar masalah yang ada adalah mengenai beratnya biaya pendidikan karena tingkat perekonomian masyarakat yang lemah.

Dari berbagai masalah yang ada, dapat dilihat pula berbagai potensi ataupun peluang yang diperkirakan dapat mengatasi masalah yang terjadi. Salah satunya adalah adanya bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang diharapkan mampu mengurangi tingkat putus sekolah bagi penduduk miskin. Dengan adanya Dana Desa dari pusat sejak tahun 2015 turut berperan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam hal pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini dan Gedung TK. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah pendidikan di Desa Hargorejo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 : Potensi dan Permasalahan Bidang Pendidikan (Terlampir)

b. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Kesehatan dan lingkungan merupakan dua hal yang sangat terkait erat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan yang sehat, kondusif dan nyaman akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya. Semakin baik kesehatan dan kualitas lingkungan suatu masyarakat maka akan berpengaruh baik juga terhadap kualitas SDM yang ada di dalamnya.

Untuk itu penyusunan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan masyarakat di dalamnya.

Secara makro, kondisi kesehatan dan lingkungan di Desa Hargorejo sudah cukup baik. Dari hasil penjarangan dalam rangka penyusunan program ini, masalah kesehatan dan lingkungan yang masih banyak dirasakan oleh masyarakat adalah masalah MCK (Mandi Cuci Kakus) dan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah). Dalam masyarakat masih dijumpai beberapa keluarga yang belum mempunyai sarana MCK maupun SPAL. Untuk itu, dalam RPJMDes ini akan dibahas mengenai berbagai masalah dan potensi dari bidang kesehatan dan lingkungan secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. : Potensi dan Permasalahan Bidang Kesehatan dan Lingkungan (Terlampir)

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam suatu wilayah. Kelengkapan sarana dan prasarana dapat menjadi faktor pendorong majunya suatu wilayah. Oleh karena itu sarana dan prasarana sangat penting untuk menjadi perhatian. Sebagian besar permasalahan di bidang sarana prasarana Desa Hargorejo yaitu belum baiknya fasilitas jalan yang merupakan denyut nadi utama transportasi meliputi perkerasan serta masih banyak jalan yang perlu di rehabilitasi akibat kerusakan seperti lubang-lubang di jalan. Tentunya permasalahan jalan yang rusak sudah seharusnya menjadi perhatian. Jalan sebagai sendi utama dalam segala hal terutama dalam memperlancar pergerakan barang, jasa dan orang sehingga nantinya mampu untuk menggerakkan perekonomian desa.

Jika melihat kondisi di lapangan banyak terlihat jalan yang berlubang. Hal ini mengganggu aktivitas warga yang akan melewati jalan tersebut. Selain itu pula

dimungkinkan jika musim penghujan datang, maka kondisi jalan akan tergenang air dan sulit untuk dilewati kendaraan bermotor. Tentunya hal ini secara tidak langsung menghambat perekonomian desa. Sebenarnya jika melihat potensi yang ada, di Desa Hargorejo tersedia banyak potensi untuk memecahkan permasalahan tersebut diantaranya adalah tersedianya swadaya masyarakat cukup besar dan bantuan dana dari pemerintah. Adanya potensi yang sangat mendukung ini, tentunya harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa terutama potensi swadaya masyarakat yang cukup besar. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel 3.5. : Potensi dan Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana (Terlampir)

d. Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan

Bidang sosial budaya dan kelembagaan dalam penyusunan RPJM Desa Hargorejo meliputi segala aspek sosial budaya dan kelembagaan yang mendampingi kehidupan masyarakat desa dalam kesehariannya, lingkungan, dan tradisi. Desa Hargorejo merupakan desa yang penuh dengan keragaman potensi sosial budaya dan kelembagaan. Permasalahan yang ada terkait dengan bidang sosial budaya dan kelembagaan tersebut perlu dipecahkan dan diselesaikan dengan segera.

Banyak tersimpan potensi sosial budaya di Desa Hargorejo. Perspektif budaya masyarakat di desa ini masih sangat kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Kulon Progo masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Keraton Kasultanan maupun Pakualaman yang ada di Yogyakarta. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental dengan tradisi budaya Jawa seperti kenduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun peringatan-peringatan lainnya.

Di desa Hargorejo ini terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang masih ada sampai sekarang. Misalnya kesenian JATHILAN merupakan salah satu kesenian yang tetap bertahan dari dulu hingga sekarang di daerah Hargorejo.

Permasalahan yang ada yang terkait dengan bidang sosial budaya di Desa Hargorejo meliputi masih ada konflik interen karena masalah sosial, masih ada kesenjangan sosial dalam masyarakat, kurangnya pementasan seni di tingkat Dusun, kurangnya kesadaran akan partisipasi untuk turut merawat bangunan

publik/fasilitas umum, kurangnya minat, terutama generasi muda, akan kesenian lokal dan pemeliharaannya, kurangnya tenaga pengajar untuk TPA, sehingga kegiatan TPA tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Sedangkan potensi kelembagaan atau kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pemberdayaan kelembagaan yang ada di Desa Hargorejo, seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Karang Taruna, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan), Satlinmas (Satuan Pelindung Masyarakat), Jaga warga dan PKK. Melalui lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan program-programnya.

Permasalahan yang ada yang terkait dengan bidang kelembagaan di Desa Hargorejo meliputi masih ada kelompok pemuda yang tidak aktif, SDM pengurus kelembagaan yang masih rendah serta tidak semua pengurus aktif, kurang terkoordinasikannya kerjasama antar RT/RW, organisasi pemuda kepengurusannya kurang jelas, kegiatan banyak yang langsung diselenggarakan di RT masing-masing, kurangnya ilmu mengenai kelembagaan, dan organisasi PKK ada yang masih pasif.

Dari berbagai permasalahan sosial, budaya dan kelembagaan, permasalahan yang diangkat menjadi prioritas adalah permasalahan yang paling banyak ditemukan di dusun-dusun di Desa Hargorejo, yaitu kurangnya minat, terutama generasi muda, akan kesenian lokal dan pemeliharaannya. SDM pengurus kelembagaan yang masih rendah serta tidak semua pengurus aktif. Permasalahan ini rata-rata terdapat di seluruh Dusun. Berikut tabel rincian permasalahan dan potensi di bidang sosial, budaya dan kelembagaan di Desa Hargorejo beserta lokasinya:

Tabel 3.6. : Potensi dan Masalah Bidang Sosial Budaya Kelembagaan (Terlampir)

e. Bidang Sosial Kependudukan

Perencanaan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Perencanaan yang baik tentunya membutuhkan berbagai data untuk menjelaskan kondisi dari suatu wilayah termasuk didalamnya data mengenai kondisi sosial di wilayah tersebut. Data sosial dalam hal ini terkait dengan kondisi kependudukan baik berupa ketenagakerjaan, mata pencaharian, kesejahteraan penduduk, kualitas penduduk maupun beberapa hal yang masih terkait.

Permasalahan yang paling dirasakan dalam bidang sosial yakni upaya pekerja rendah dan pengangguran tinggi serta pendapatan perkapita masih rendah. Selain itu terdapat beberapa permasalahan lain yang juga banyak dirasakan di beberapa dusun yakni terkait dengan mata pencaharian penduduk serta sumberdaya manusia yang ada.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa permasalahan dalam bidang sosial kependudukan di Desa Hargorejo yakni pengangguran yang cukup tinggi. Pengangguran yang ada dapat disebabkan oleh kurangnya keahlian ataupun dikarenakan tidak adanya kemauan untuk bekerja. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Pengangguran dapat menjadi beban masyarakat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun demikian permasalahan ini bukan tidak dapat dipecahkan. Desa Hargorejo kaya akan sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan. Dengan semangat wirausaha dan kreativitas, sumberdaya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja baru. Selain itu adanya bantuan pinjaman modal dari Kelompok, koperasi dan instansi lainnya bagi masyarakat yang akan melakukan usaha merupakan solusi bagi mereka yang terkendala masalah modal.

Dalam hal ini pemerintah desa juga memfasilitasi melalui program pelatihan dan penyuluhan keterampilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Dinas terkait. Untuk lebih jelasnya berbagai permasalahan dan potensi dalam bidang sosial di Desa Hargorejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. : Potensi dan Permasalahan Bidang Sosial Kependudukan (Terlampir)

f. Tingkat Kesejahteraan dan kemiskinan penduduk.

Berdasarkan Album Kemiskinan Tahun 2015 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Desa Hargorejo sudah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014. Namun lain halnya di Tahun 2016 data penduduk miskin Hargorejo bertambah hal ini dimungkinkan karena kriteria kemiskinan yang lebih meluas dibanding tahun sebelumnya.

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Penyusunan RPJM Desa membutuhkan suatu filosofi yang mempunyai wawasan luas yang mampu menjadi pedoman bagi desa dalam menentukan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan. Filosofi harus digali dari filosofi luhur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Semangat kegotongroyongan yang melekat erat di masyarakat Desa Hargorejo adalah modal partisipasi dan kepeduliannya untuk membangun desa.

Berdasar filosofi yang juga terintegrasi dengan visi misi Kepala Desa terpilih tersebut, Kami tuang Visi Misi Pembangunan Desa Hargorejo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai berikut:

“PEMBANGUNAN DESA HARGOREJO YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN BUDI PEKERTI LUHUR SEHINGGA TERWUJUD SEMANGAT GOTONG ROYONG DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, TENTERAM, MANDIRI DAN SEJAHTERA.”

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan.

BUDI PEKERTI LUHUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang beretika dan berbudaya.

SEMANGAT GOTONG ROYONG: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang lebih mengedepankan kebersamaan, kerjasama, dan keikhlasan.

MASYARAKAT YANG ADIL: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.

MASYARAKAT YANG MAKMUR: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lahir dan batin.

MASYARAKAT YANG TENTERAM: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suasana yang aman dan asri.

MANDIRI: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun memiliki pendapatan secara layak.

4.1.2 Misi

Berdasarkan visi RPJM Desa Hargorejo tersebut di atas maka dengan didukung oleh peningkatan etos kerja Perangkat, tokoh masyarakat serta segenap masyarakat desa Hargorejo dalam mewujudkan visi kepala desa, maka misi Pembangunan jangka menengah Desa Hargorejo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan keagamaan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Meningkatkan pelayanan infrastruktur desa.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada pertanian dalam arti luas yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi desa .
6. Menumbuhkembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan desa Hargorejo periode jangka menengah tahun 2015 – 2020, adalah hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan Misi yaitu :

1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keimanan dan ketaqwaan.
2. Meningkatnya kapasitas dan keberpihakan kelembagaan desa kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berjiwa kepemimpinan.

4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Berkembangnya perekonomian masyarakat
7. Terfasilitasinya pengembangan dunia usaha dan investasi desa.
8. Pelestarian budaya dan fungsi lingkungan hidup.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan diantaranya meliputi :

a. Bidang Pendidikan

- Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
- Meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah dan berkurangnya usia lanjut yang buta huruf

b. Bidang Kesehatan

- Mengoptimalkan kinerja POKJANAL (Kelompok Kerja Operasional)
- Mengoptimalkan kinerja kader kesehatan
- Pengadaan pelayanan kesehatan ditingkat desa PUSTU (Puskesmas Pembantu)
- Meningkatkan kesadaran PHBS

c. Bidang Sarana dan Prasarana

- Melibatkan semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Memaksimalkan fungsi dan peran kelembagaan yang ada untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan
- Mengedepankan musyawarah warga untuk menentukan skala prioritas kegiatan
- Pemerataan pembangunan di semua pedukuhan
- Mengoptimalkan pemberdayaan pemuda dan perempuan
- Mengupayakan dan mengusulkan program-program dari pemerintah

d. Bidang Lingkungan Hidup

- Mengoptimalkan pengelolaan sampah
- Penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- Reboisasi
- Penegakkan hukum lingkungan

e. Bidang Sosial Budaya

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan
- Menggiatkan Posyandu
- Penatausahaan lingkungan
- Mengaktifkan kembali Jam Belajar Masyarakat (JBM)
- Membina kehidupan beragama
- Melestarikan budaya dan adat istiadat setempat

f. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada
- Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif
- Meningkatkan hasil jual produksi lokal
- Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam berusaha
- Menciptakan lapangan pekerjaan

g. Bidang Pemerintahan

- Memberi pelayanan yang prima; cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat.
- Menjaga hubungan baik dan koordinatif dengan pemerintahan di atasnya
- Menjalankan pemerintahan sesuai peraturan yang ada
- Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

URUSAN PILIHAN

h. Bidang Pariwisata

- Menggali potensi wisata
- Membangun objek wisata
- Menggalakkan promosi dan investasi di bidang pariwisata

i. Bidang Pertanian

- Meningkatkan ketahanan pangan
- Meningkatkan hasil budidaya ternak
- Meningkatkan budidaya perikanan darat
- Meningkatkan hasil perkebunan

j. Bidang Pertambangan

- Menginventarisasi potensi tambang di Hargorejo
- Mempromosikan potensi tambang di Hargorejo
- Pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan terkait penambangan yang telah ada
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik

k. Bidang Kehutanan

- Optimalisasi pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
- Optimalisasi pengelolaan Hutan Rakyat (HTR)

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

1. Misi mewujudkan bidang pendidikan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang pendidikan adalah:

1.1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik

1.1.1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi tenaga pendidik PAUD

1.1.2. Mengadakan studi banding

1.1.3. Memberikan honor bagi tenaga pendidik PAUD

1.2. Meningkatkan sarana dan prasarana.

1.2.1. Membangun gedung PAUD dan gedung TK Terpadu PKK desa

1.2.2. Membangun gedung perpustakaan desa

1.2.3. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD

1.2.4. Pengadaan operasional PAUD

1.2.5. Pemeliharaan gedung

1.3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

1.3.1. Sosialisasi pentingnya pendidikan

1.3.2. Pengentasan Program Pendidikan Dasar 12 Tahun

1.3.3. Mengadakan pelatihan ketrampilan kerja tingkat desa

1.4. Meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah dan berkurangnya usia lanjut yang buta huruf

1.4.1. Mengoptimalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1.4.2. Stimulant operasional TPA dan Sekolah Minggu

2. Misi mewujudkan bidang Kesehatan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang kesehatan adalah:

2.1. Mengoptimalkan kinerja POKJANAL (Kelompok Kerja Operasional)

2.1.1. Pemahaman tupoksi Pokjanal

2.1.2. Kerjasama lintas sektoral

2.1.3. Desa Siaga

2.2. Mengoptimalkan kinerja kader Posyandu

2.2.1. Insentif kader

2.2.2. Perekrutan SDM yang memiliki kapasitas

2.2.3. Pendidikan dan pelatihan

2.3. Pengadaan pelayanan kesehatan ditingkat desa PUSTU (Puskesmas Pembantu)

2.3.1. Penambahan sarana dan prasarana

2.4. Meningkatkan kesadaran PHBS

2.4.1. Sosialisasi PHBS

2.4.2. Kampanye Bebas Rokok

2.4.3. Kampanye Kebiasaan Cuci Tangan pakai Sabun

2.4.4. Jambanisasi dan lantainisasi

2.4.5. Pengadaan ruang khusus merokok (Smooking Area)

2.4.6. Jumat Bersih dan Minggu Sehat

2.4.7. Pengadaan wastafel di tempat-tempat umum

3. Misi mewujudkan bidang Sarana dan prasarana

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang sarana dan prasarana adalah:

3.1. Melibatkan semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3.1.1. Musyawarah Dusun (Musdus)

3.1.2. Musrenbangdes

3.1.3. Asistensi dan kemitraan

3.2. Memaksimalkan fungsi dan peran kelembagaan yang ada untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan

3.2.1. Pembagian tugas dan kewenangan

3.2.2. Koordinasi dan komunikasi

3.2.3. Pendidikan dan pelatihan

3.3. Mengedepankan musyawarah warga untuk menentukan skala prioritas kegiatan

3.3.1. Sosialisasi

3.3.2. Penyajiaan Data Base

3.3.3. Menumbuhkan kesadaran musyawarah mufakat

3.4. Pemerataan pembangunan di semua pedukuhan

3.4.1. Perencanaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan

3.4.2. Pemerataan pembangunan berdasarkan skala prioritas di pedukuhan

3.5. Mengoptimalkan pemberdayaan pemuda dan perempuan

3.5.1. Peran serta pemuda dalam pembangunan

3.5.2. Keterwakilan perempuan dalam organisasi dan perencanaan pembangunan

3.6. Mengupayakan dan mengusulkan program-program Pemerintah

3.6.1. Mengakses informasi

3.6.2. Mengadakan lobi-lobi ke pemangku kepentingan

4. Misi mewujudkan bidang Lingkungan hidup

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang lingkungan hidup adalah:

4.1. Mengoptimalkan pengelolaan sampah

4.1.1. Bank Sampah

4.2. Penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

4.2.1. Sosialisasi

4.2.2. Pengawasan dan pengendalian

4.2.3. Monitoring dan evaluasi

4.2.4. Uji standar air

4.3. Reboisasi

4.3.1. Pengadaan bibit (Kebun Bibit Rakyat)

4.3.2. Penanaman dan perawatan

4.4. Penegakkan hukum lingkungan

4.4.1. Peraturan Desa (Perdes)

4.4.2. Sosialisasi

5. Misi mewujudkan bidang Sosial Budaya

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang sosial budaya adalah:

5.1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan

5.1.1. Pendidikan dan budaya hidup sehat berbasis keluarga (*Unggah-ungguh/tatakrama*)

5.1.2. Budaya gotong royong untuk mencapai derajat kesehatan mental di masyarakat

5.2. Menggiatkan Posyandu

5.2.1. Monitoring dan pengawasan

5.2.2. Pemberdayaan kader

5.2.3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan

5.3. Penataan lingkungan

5.3.1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah

5.3.2. Sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

5.3.3. Pemanfaatan pekarangan dari tingkat keluarga sampai tingkat desa

5.3.4. Menggiatkan gotong royong dalam masyarakat: sinoman, sambatan, dsb.

5.4. Mengaktifkan kembali Jam Belajar Masyarakat (JBM)

5.4.1. Sosialisasi

5.4.2. Peraturan Kepala Desa (Perkades)

5.4.3. Keteladanan

5.5. Membina kehidupan beragama

5.5.1. Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ibadah

- 5.5.2. Pengembangan kesenian berbasis keagamaan
- 5.5.3. Dibentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

5.6. Melestarikan budaya dan adat istiadat setempat

- 5.6.1. Membudayakan bahasa jawa dalam pertemuan-pertemuan formal dan informal
- 5.6.2. Pelatihan bahasa jawa tentang sesorah
- 5.6.3. Nyadran dan Bersih Desa
- 5.6.4. Pengadaan dan pemeliharaan balai makam

6. Misi mewujudkan bidang Koperasi dan Usaha masyarakat

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang koperasi dan usaha masyarakat adalah:

6.1. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada

- 6.1.1. Pelatihan kerja dan kewirausahaan
- 6.1.2. Studi banding
- 6.1.3. Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong
- 6.1.4. Menjalin kemitraan

6.2. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif

- 6.2.1. Inventarisir kegiatan ekonomi produktif masyarakat atau kelompok-kelompok
- 6.2.2. Peraturan Desa tentang pengelolaan dana bergulir
- 6.2.3. Kelompok Usaha Bersama (Kube)
- 6.2.4. Bantuan Modal usaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)
- 6.2.5. Mengembangkan Perumdes/Bumdes
- 6.2.6. Mengembangkan koperasi serba usaha

6.3. Meningkatkan hasil jual produksi lokal

- 6.3.1. Pengembangan dan rehabilitasi Pasar Desa
- 6.3.2. Kemitraan
- 6.3.3. Standarisasi produk lokal
- 6.3.4. Promosi produk (misal: Hargorejo Fair, website, media sosial)

6.4. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam berusaha

- 6.4.1. Pendidikan dan pelatihan
- 6.4.2. Kunjungan dunia usaha
- 6.4.3. Magang usaha

6.5. Menciptakan lapangan pekerjaan

- 6.5.1. Menumbuhkan dan mengembangkan industri rumah tangga
- 6.5.2. Mendirikan kios-kios desa
- 6.5.3. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerajinan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
- 6.5.4. Balai Latihan Kerja
- 6.5.5. Memberdayakan kegiatan Dasawisma, Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani

7. Misi mewujudkan bidang Pemerintahan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang pemerintahan adalah:

7.1. Memberi pelayanan yang prima; cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat.

7.1.1. Pengisian perangkat desa

7.1.2. Pengadaan sarana dan prasarana

7.1.3. Optimalisasi terjaminnya kesejahteraan perangkat desa melalui Tunjangan penghasilan, Tunjangan anak-Istri/suami, Tunjangan kesehatan, penghasilan Purna Tugas, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tunjangan Pendidikan Perangkat Desa.

7.1.4. Sopan, sapa, salam, santun, senyum,

7.1.5. Bimtek bagi perangkat desa

7.1.6. Pelayanan berbasis Teknologi Informasi

7.2. Menjaga hubungan baik dan koordinatif dengan pemerintahan di atasnya

7.2.1. Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi

7.2.2. Laporan berkala tepat waktu

7.3. Menjalankan pemerintahan sesuai peraturan yang ada

7.3.1. Sosialisasi

7.3.2. Menerbitkan Standard Operasional Procedure (SOP)

7.3.3. Menjaga kedisiplinan perangkat desa

7.3.4. Tertib administrasi

7.3.5. Evaluasi

7.4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

7.4.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat

7.4.2. Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

7.4.3. Menggalakkan siskamling

7.4.4. Pengadaan dan rehabilitasi poskamling

7.4.5. Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala desa (Perkades)

8. Misi mewujudkan bidang Pariwisata

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang pariwisata adalah:

8.1. Menggali potensi wisata

8.1.1. Inventarisasi potensi wisata

8.1.2. Membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdawis)

8.1.3. Membangun infrastruktur menuju lokasi wisata yang direncanakan

8.2. Membangun objek wisata

8.2.1. Cagar Budaya dan situs

8.2.2. Agrowisata

8.2.3. Bumi Perkemahan

8.2.4. Wisata alam

8.3. Menggalakkan promosi dan investasi di bidang pariwisata.

8.3.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi (website, media cetak, media sosial)

8.3.2. Kemitraan

9. Misi mewujudkan bidang Pertanian

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang pertanian adalah:

9.1. Meningkatkan ketahanan pangan

9.1.1. Optimalisasi fungsi Desa Mandiri Pangan (Demapan)

9.1.2. Optimalisasi fungsi Tim Pangan Desa (TPD)

9.1.3. Lumbung Desa

9.1.4. Budidaya pangan local

9.1.5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian

9.2. Meningkatkan hasil budidaya ternak

9.2.1. Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan perorangan

9.2.2. Tersedianya pakan ternak

9.2.3. Pengolahan pupuk organik

9.3. Meningkatkan budidaya perikanan darat

9.3.1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP)

9.3.2. Pendampingan Pokdakan (Kelompok budidaya ikan) dan Poklahsar (Kelompok pengolah dan pemasar)

9.3.3. Pembentukan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)

9.4. Meningkatkan hasil perkebunan.

9.4.1. Peremajaan tanaman perkebunan, seperti kelapa, kakao, dst.

9.4.2. Sertifikasi tanaman kelapa

9.4.3. Kebun Bibit Rakyat (KBR)

9.4.4. Manajemen Usaha Tani (MUT)

10. Misi mewujudkan bidang Pertambangan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang pertambangan adalah:

10.1. Menginventarisasi potensi tambang di Hargorejo

10.1.1. Pendataan

10.1.2. Eksplorasi

10.1.3. Kerjasama dengan pihak ketiga

10.2. Mempromosikan potensi tambang di Hargorejo

10.2.1. Kerjasama dengan Investor

10.2.2. Memanfaatkan Teknologi informasi

10.3. Pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan terkait penambangan yang telah ada

10.3.1. Peraturan Desa (Perdes)

10.3.2. Sosialisasi

10.4. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik.

10.4.1. Pendataan

10.4.2. Listrik Desa (Lisdes)

10.4.3. Energi alternative: bioenergi dan tenaga surya

11. Misi mewujudkan bidang Kehutanan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi bidang kehutanan adalah:

11.1. Optimalisasi pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

11.1.1. Konservasi hutan

11.1.2. Mengajukan proposal pada dinas terkait

11.2. Optimalisasi pengelolaan Hutan Rakyat (HTR)

11.2.1. Peran serta kelompok

11.2.2. Mengajukan proposal

Desa Hargorejo merupakan pintu gerbang jalan menuju KSPN Borobudur melalui jalur bedah menorah. Dipandang perlu untuk mengembangkan potensi wisata dan sarana prasarana pendukung pendukung lainnya. Pembangunan desa Hargorejo dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Desa Hargorejo sebagai desa mandiri pangan perlu ditingkatkan melalui sentra pengembangan hortikultura. Fokus pengembangan hortikultura yaitu pada komoditi-komoditi makanan lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan handal bersaing dengan daerah lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun langkah-langkah pembangunan yang tersistem, terukur dan berkelanjutan
2. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi Masyarakat;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui PHBS;
6. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Gotong Royong, Efektif dan Efesien, Akuntabel, Transparansi, Etos kerja dan religius.
7. Menetapkan prioritas pembangunan antara lain :
 - a) Pembangunan diarahkan pada infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, jalan menuju obyek wisata, jalan lingkungan;
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana umum;
 - c) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi ;
 - d) Pembangunan fasilitas sarana pendidikan;
 - e) Pembangunan pengembangan kepariwisataan.

Proses penyusunan strategi pencapaian program dan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembuatan skala prioritas. Bertujuan untuk mendapatkan priritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan,
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
3. Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten, skala propinsi dan skala nasional.
4. Menyusun dan memilah rencana kegiatan bedasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa yang bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas:

- a) Sekretaris Desa selaku koordinator;
- b) 2 (dua) kepala urusan; dan
- c) 3 (tiga) kepala seksi

Sekretaris Desa selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu Kepala Desa juga menetapkan Bendahara Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam pengelolaan keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawabannya keuangan desa.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Pusat-Daerah (ADD), maupun lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Namun Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari kabupaten maupun propinsi.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan desa dan lapangan desa.
- c. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa
- d. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan penerimaan dari BUMDes.

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya PADes secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian masyarakat.

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dibagi dalam 4 bidang, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun proporsi belanja berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan BHP, BHR dan ADD serta Peraturan terkait tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Secara umum proporsi belanja desa adalah :

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan;
- 2) Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3) Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk membiayai :
 1. Tunjangan Kepala Desa dan Pemerintah Desa;
 2. Tunjangan BPD;
 3. Operasional Pemerintah Desa;
 4. Operasional Pemerintah Desa; dan
 5. Operasional RT dan RW.

Agar terjadi peningkatan efektivitas belanja Desa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan alokasi dana yang proporsional untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam;
2. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Desa yang lebih baik dengan penerapan sistem akuntansi yang mendukung penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas pencatatan (pembukuan dan pelaporan) serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel;
4. Dalam penerapan belanja desa berpedoman pada asas efektif, efisien, dan ekonomis, serta untuk mendanai urusan wajib, urusan pilihan, urusan tertentu berupa kerjasama yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam pencapaian prestasi kerja sesuai kebutuhan yang terukur.

Untuk menertibkan administrasi keuangan desa, maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa. PTPKD diberi hak untuk mencairkan dana sesuai dengan APBDes dengan persetujuan Kepala Desa dan dilanjutkan oleh Bendahara Desa.

3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam pelaksanaan anggaran terdapat anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang telah disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum merupakan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan 6 (enam) ke depan yang pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi desa sehingga masyarakat desa akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Agar dalam pembangunan desa terdapat kesatuan arah dan kebijakan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak antara legislatif dan eksekutif. Arah kebijakan pembangunan desa yang mengandung arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan untuk jangka waktu tertentu dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Permasalahan desa yang mendesak dan harus segera diatasi.
- b) Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijangkau melalui mekanisme formal.
- c) Kemampuan desa khususnya pendanaan pembangunan, sumberdaya alam yang ada dan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada untuk ditingkatkan.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2020 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun (RPJM Dus), dan program-program Bidang Pemerintahan yang rutin dilaksanakan setiap tahun akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2015-2020 adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan keagamaan.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

- c. Mensinergikan kebijakan pemerintah dan peran masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter.
 - d. Meningkatkan sarana dan kapasitas SDM perpustakaan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik.
- Kebijakan diarahkan untuk :
- a. Peningkatan manajemen kinerja Pemerintah Desa
 - b. Peningkatan kualitas dan sistem pelayanan publik
 - c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa
 - d. Optimalisasi sumber daya aparatur
 - e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa
 - f. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman
 - g. Peningkatan dan pengembangan inovasi desa
3. Meningkatkan pelayanan infrastruktur desa.
- Kebijakan diarahkan untuk :
- a. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b. Pembangunan infrastruktur pelayanan kebutuhan dasar
 - c. Peningkatan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup
 - d. Peningkatan penanganan bencana alam
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada pertanian dalam arti luas yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
- Kebijakan diarahkan untuk :
- a. Peningkatan kontinuitas dan kualitas produk pertanian
 - b. Penerapan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan masalah pangan dan gizi
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan UMKM
 - e. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
5. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi desa .
- Kebijakan diarahkan untuk :
- a. Meningkatkan fasilitas dan mendorong iklim investasi yang kondusif
 - b. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan SDM
 - c. Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan
 - d. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana desa wisata
 - e. Optimalisasi tanah kas desa dan pasar desa

6. Menumbuhkembangkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat istiadat dan tradisi kehidupan, seni, bahasa dan sastra
- b. Meningkatkan pelestarian kekayaan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya lokal
- c. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai icon daya tarik wisata edukasi

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Adapun program yang akan dilakukan dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; dan
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa.

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - i. jalan pemukiman;
 - ii. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - iii. lingkungan permukiman masyarakat Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - i. air bersih berskala Desa;
 - ii. sanitasi lingkungan;
 - iii. pelayanan kesehatan Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - i. taman bacaan masyarakat;
 - ii. pendidikan anak usia dini.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - i. pasar Desa;
 - ii. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - iii. penguatan permodalan BUM Desa;
 - iv. pembibitan tanaman pangan;
 - v. lumbung Desa;
 - vi. pembukaan lahan pertanian;

- vii. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - viii. kandang ternak;
 - ix. instalasi biogas;
 - x. mesin pakan ternak;
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - i. penghijauan;
 - ii. perlindungan mata air;
 - iii. pembersihan daerah aliran sungai.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - i. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - ii. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - iii. kelompok perempuan,
 - iv. kelompok tani,
 - v. kelompok masyarakat miskin,
 - vi. kelompok pengrajin,
 - vii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - viii. kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2020 ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo 2005-2025 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2020 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya dan dalam Kebijakan Umum APBDDes setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Program Transisi

RPJM Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo 2015 – 2020 disusun untuk jangka waktu enam tahun memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan Kepala Desa terpilih, sehingga masa berlaku RPJM Desa ini berakhir sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan berakhirnya masa bakti Kepala Desa. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan, diharapkan pada tahun 2020 sudah mulai disiapkan dokumen RPJM Desa Hargorejo untuk enam tahun berikutnya.

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Tahun 2015 – 2020 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa Hargorejo periode 2014 – 2020.

RPJMDDes Tahun 2015 – 2020 ini merupakan pedoman bagi Kepala Seksi/Dukuh/LKD dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Kepala Seksi/Dukuh/LKD. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMDDes Tahun 2015 - 2020 dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Desa dan LKD berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa dan LKD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMDDes Tahun 2015 – 2020;

3. Perangkat Desa dan /LKD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMDes Tahun 2015 - 2020 dengan Rencana Kerja Perangkat Desa dan LKD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMDes Tahun 2015 – 2020, Bagian Pembangunan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDes ke dalam Rencana Kerja Perangkat Desa dan LKD.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Dari Pedukuhan
7. Daftar Gagasan Pedukuhan
8. Sketsa Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi
9. Kalender Musim Dan Daftar Masalah Dan Potensi
10. Bagan Kelembagaan Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi
11. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
12. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
13. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui MUSDES
14. Rancangan RPJM Desa
15. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
16. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui MUSRENBANGDES

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE DESA**

DESA : HARGOREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/ RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : HARGOREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	400,000	m3
2	Pasir urug	300,000	m3
3	Lahan Tegalan	60,32	Ha
4	Lahan Persawahan	24,64	Ha
5	Lahan Hutan	635,86	Ha
6	Sungai	8,124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	3,69	Ha
8	Sumber Mata Air	3	bh

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : **HARGOREJO**
KECAMATAN : **KOKAP**
KABUPATEN : **KULON PROGO**
PROVINSI : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	4.502	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	4.875	orang
	c. Jumlah keluarga	3.227	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	4797	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	44	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	446	orang
	d. Listrik, Gas, Air	32	orang
	e. Bangunan/ konstruksi	287	orang
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	143	orang
	g. Transportasi, Pengangkutan dan Komunikasi	63	orang
	h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	140	orang
	i. Jasa lainnya (jasa perseorangan, masyarakat, sosial, dll)	234	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan D4 dan Sarjana (S1 s/d S3)	315	orang
	b. Lulusan Diploma (D1 s/d D3)	310	orang
	c. Lulusan SMA	2546	orang
	d. Lulusan SMP	1864	orang
	e. Lulusan SD	1587	orang
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	86	orang
4	Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja di Luar Negeri	78	orang

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : **HARGOREJO**
KECAMATAN : **KOKAP**
KABUPATEN : **KULON PROGO**
PROVINSI : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	57,850	Km
	b. Jembatan	4	Unit
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	3	Unit
	b. Gedung TK	4	Unit
	c. Gedung SD	8	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	20	Unit
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	16	Unit
	b. Polindes		
	c. MCK	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih	1	Unit
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	2	Unit
	b. Kios Desa	9	Unit
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	29	kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat	2.000.000.000	Rp.

Mengetahui,
Kepala Desa

(ADI PURNOMO)

Hargorejo, Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(SITI NURA'ENI)

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : **HARGOREJO**
KECAMATAN : **KOKAP**
KABUPATEN : **KULON PROGO**
PROVINSI : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
	Kegiatan adat dan tradisi		
1	Gotong Royong	1 kali	Bulan
2	Bersih Desa	1 kali	Tahun
3	Syawalan	1 kali	Tahun
4	Tradisi Nyadran	1 kali	Tahun
5	Peringatan kematian (Tahlilan)		Sesuai kebutuhan
6	Pernikahan		Sesuai kebutuhan
7	Tingkepan		Sesuai kebutuhan
	Kegiatan kesenian		
1	Jathilan	3	kelompok
2	Hadroh	3	kelompok
3	Karawitan	4	kelompok
4	Sholawat	3	kelompok
5	Kethoprak	2	kelompok
6	Incling Krumpyung	1	kelompok
7	Angguk	1	kelompok

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : **HARGOREJO**
KECAMATAN : **KOKAP**
KABUPATEN : **KULON PROGO**
PROVINSI : **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	<i>Penyelenggaraan pemerintahan desa</i>						
	1. <i>Penetapan dan penegasan batas Desa</i>	<i>Dusun ...</i>	<i>1</i>	<i>paket</i>	-	-	-
	2. <i>Pendataan Desa</i>						
	3. <i>Penyusunan tata ruang Desa</i>						
						
II	<i>Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>						
	1. <i>Pemeliharaan jalan</i>						
	2. <i>Pembangunan jaringan irigasi</i>						
	3. <i>Rehabilitasi Gedung Posyandu</i>						
						
III	<i>Pembinaan Kemasyarakatan</i>						
	1. <i>Pembinaan PKK</i>						
	2. <i>Pelaksa-naan Siskamling</i>						
	3. <i>Pembinaan kerukunan umat beragama</i>						
	...						
IV	<i>Pemberdayaan Masyarakat</i>						
	1. <i>Pelatihan tata boga</i>						
	2. <i>Pelatihan teknologi tepat guna</i>						
	3. <i>Pelatihan KPMD</i>						
						

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR GAGASAN PEDUKUHAN

DESA : HARGOREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo,2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

SKETSA DESA DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA/POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1.		1. Balai Desa	7.		7. Posyandu	13.		13. Kolam ikan
2.		2. Pekar	8.		8. sawah	14.		14. Sunaai
3.		3. Gereja	9.		9. Jembatan	15.		15. Kebun Kopi
4.		4. Gedung SD	10.		10. Perumahan	16.		16. Pinus
5.		5. Masjid	11.		11. Jalan Kampung	17.		17. Jagung
6.		6. Gedung TK	12.		12. Jalan Desa	18.		18. Lap. Bata

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

KALENDER MUSIM DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

A. Gambar Kalender Musim

NO	MASALAH/KEGIATAN /KEADAAN	PANCARO BA			MUSIM KEMARAU					MUSIM HUJAN			
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Menyusutnya debit air yang ber-				v	v	v	v	v				
	pengaruh pada sektor pertanian												
2	Air untuk irigasi berkurang						v	v	v				
3	Kekeringan menyebabkan tanah sulit untuk ditanami						v	v	v				
4	Hasil nira dan kelapa berkurang						v	v	v				
5	Hasil palawija berkurang						v	v	v				
6	Hasil panen padi gagal karena hama mewabah			v	v								
7	Berkembangnya nyamuk dan lalat yang menyebabkan penyakit bagi manusia dan ternak	v	v	v						v	v	v	v
8	Menurunnya kualitas dan jumlah pakan ternak yang berasal dari tumbuhan hijau karena kekeringan					v	v	v	v	v	v		
9	Timbulnya peristiwa alam seperti tanah longsor dan banjir yang merusak sarana fisik umum maupun pribadi									v	v	v	v

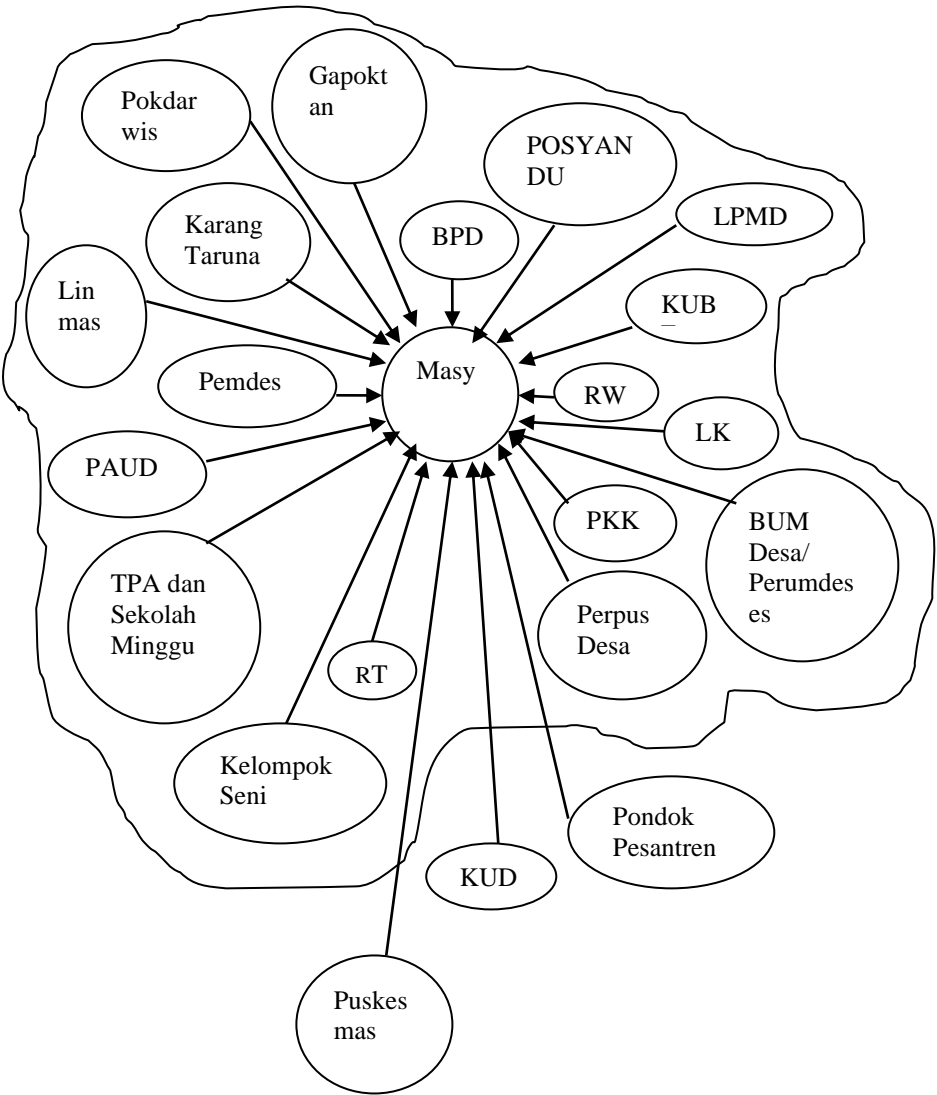


B. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI	LOKASI
1	Menyusutnya debit air yang ber-	Swadaya Tenaga kerja masyarakat, GP3A,	Kriyan, Ngulakan,
	pengaruh pada sektor pertanian	Dinas dan Penyuluh Pertanian	Sindon, Sangkrek
2	Air untuk irigasi berkurang	Saluran irigasi Induk Kalibawang	
3	Kekeringan menyebabkan tanah sulit untuk ditanami	Air tanah, embung, gully plug	
4	Hasil nira dan kelapa berkurang	Pupuk kandang, sumur resapan	Desa Hargorejo
5	Hasil palawija berkurang	Pupuk kandang, sumur resapan	Desa Hargorejo
6	Hasil panen padi gagal karena hama mewabah	Predator alami	Kriyan, Ngulakan,Sangkr ek
7	Berkembangnya nyamuk dan lalat yang menyebabkan penyakit bagi manusia dan ternak	Apotik hidup, Puskesmas, Posyandu, Pokjanal	Desa Hargorejo
8	Menurunnya kualitas dan jumlah pakan ternak yang berasal dari tumbuhan hijau karena kekeringan	Pakan ternak non tumbuhan, Fermentasi pakan ternak yang tahan lama, Dinas Pertanian	Desa Hargorejo
9	Timbulnya peristiwa alam seperti tanah longsor dan banjir yang merusak sarana fisik umum maupun pribadi	Swadaya masyarakat, Tim Relawan, reboisasi, terasering, drainase	Gunung Kukusan, Gunung Rego, Selo

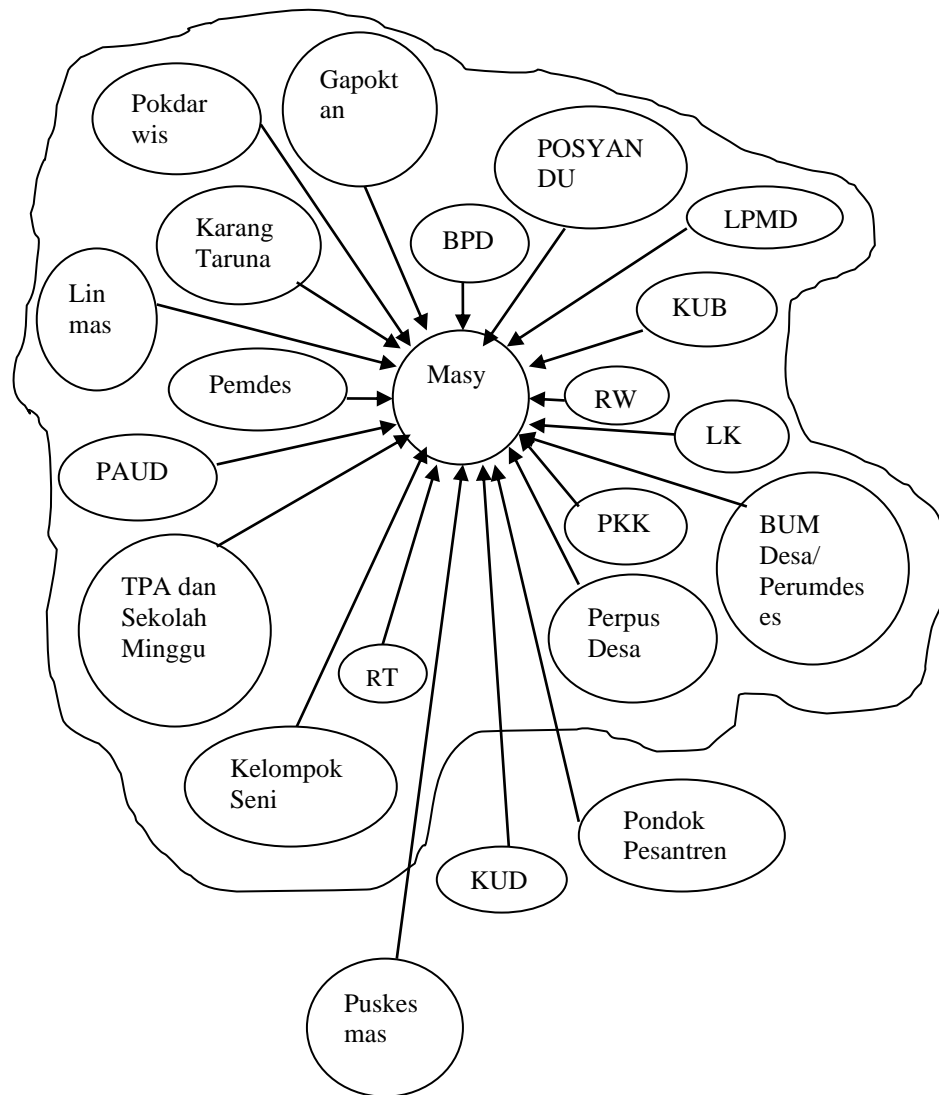
BAGAN KELEMBAGAAN DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAN

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	Kompetensi aparatur kurang optimal dan jumlah aparatur kurang	Komunikasi memadai
2	Badan Permusyawaratan Desa	Kompetensi aparatur kurang optimal	Keterwakilan wilayah pedukuhan terpenuhi
3	RT/RW	Biaya operasional RT/RW kurang	SDM ada
		RT/RW belum ada regenerasi	Peran/keberadaannya masih dibutuhkan
4	PKK	Administrasi di tk. Dusun dan desa belum lengkap	Ada kader di setiap pedukuhan
5	PAUD	Kurangnya kesadaran pentingnya Pendidikan anak usia dini	Setiap Pedukuhan memiliki POS PAUD
			Kualifikasi pendidik (tamat SMA)
6	POSYANDU	Belum ada keterpaduan kegiatan di POSYANDU	Ada kader di setiap pedukuhan, POS tersedia
7	TPA dan Sekolah Minggu	Insentif bagi guru masih kurang	Saarana tersedia di pedukuhan
8	ROIS dan Prodiakon	Insentif bagi kaum rois masih kurang	SDM memadai
9	Pokdarwis	Kinerja belum maksimal	Setiap Dusun memiliki sub Pokdarwis, SDM ada
10	PUSKESMAS	Antrian yang panjang membuat masyarakat mengeluh	Adanya Pelayanan Prima



No	Lembaga	Masalah	Potensi
11	BUMDES/ PERUMDES	Kredit Macet	Dana di PERUMDES melimpah
12	Perpustakaan Desa Swapustaka	Kegiatan belum berlangsung optimal	Ada sarana dan pengurus Perpudes
13	KARANG TARUNA	Kurangnya koordinasi tingkat Desa	Pengurus tingkat desa ada
14	KUBE	Volume penerima manfaat masih sedikit	Strategi bantuan tepat guna
15	PONDOK PESANTREN	Kebanyakan Santri berasal dari luar wilayah	Ada pondok dan pengasuh
16	GAPOKTAN	Perlu penyegaran kepengurusan	Ada sekretariat dan struktur organisasi
19	LINMAS	Kompetensi Personil	Keterwakilan setiap dusun terpenuhi
20	LKM	Kredit Macet	Ada kepengurusan
21	KELOMPOK SENI	Belum ada regenerasi pekerja seni	Sarana ada meski kurang memadai

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : HARGOREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. Hasil

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, 23 Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Hargorejo

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Dukuh, warga pedukuhan, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, 24 Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 4 November 2017
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Hargorejo

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- 1) Laporan hasil pengkajian desa
- 2) Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa
- 3) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Drs. Subaga dari Ketua BPD Hargorejo
Notulen : Aprillia Ayu Saputri,SH dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Adi Purnomo dari Kepala Desa Hargorejo
2. Sri Widada,S.Ip,Mm dari Ketua LPMD
3. Siti Nura'eni dari Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

- Sesuai dengan hasil pengkajian keadaan Desa dari hasil penyelarasan data desa dan perbandingan dengan kondisi terkini untuk prioritas rencana kegiatan Desa melanjutkan dokumen yang lalu
- Menambahkan usulan kegiatan yang belum tercantum dalam dokumen awal berdasarkan hasil musyawarah dan penentuan prioritas
- Rencana pelaksana kegiatan Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kepala seksi dan kepala urusan dengan melibatkan peran serta kelembagaan dan unsur masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, 4 November 2017
Ketua BPD

(ADI PURNOMO)

(Drs. SUBAGA)

Wakil Masyarakat

(.....)

RANCANGAN RPJM DESA PERIODE TAHUN 2015 - 2020

DESA : HARGOREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

[illegible]

		c.															
		d.															
Jumlah Per Bidang 3														-			
4	Pemberdaya an Masyara- kat	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
Jumlah Per Bidang 4																	
JUMLAH TOTAL														-			

Mengetahui,
Kepala Desa

(ADI PURNOMO)

Desa, tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(SITI NUIRA'ENI)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 November 2017
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Hargorejo

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara dalam musyawarah Desa;
2. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa;

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Hargorejo, 8 November 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ADI PURNOMO)

(SITI NURA'ENI)

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Hargorejo

telah diadakan acara MUSRENBANGDES yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MUSRENBANGDES ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1) Pencermatan Dokumen RPJM Desa sebelumnya;
- 2) Identifikasi usulan baru, yang belum terdokumen dalam RPJM Desa sebelumnya;
- 3) Penentuan peringkat usulan yang belum terlaksana;
- 4) Penyelarasan sub bidang dengan nomenklatur kewenangan desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Siti Nura'eni dari Sekretaris Desa
Notulen : Savira Dwi Cahyani, S.Pd.I, Mm dari Kasi
Pembangunan dan Pemberdayaan
Narasumber : 1. Adi Purnomo dari Kepala Desa
2. Drs. Subaga dari Ketua BPD
3. Drs. Mitoto Cipto Suroso dari Camat
Kokap

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta MUSRENBANGDES menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari MUSRENBANGDES dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa yaitu :

1. Hasil diskusi kelompok yang telah tertuang dalam notulen kelompok akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan kegiatan tahunan;
2. Program dan kegiatan dalam Dokumen RPJM awal/ murni tetap dilanjutkan sesuai dengan tingkatan prioritas;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Hargorejo, November 2017
Kepala Desa

(Drs. SUBAGA)

(ADI PURNOMO)

Wakil Masyarakat

(.....)

Hargorejo, November 2017
Kepala Desa

(ADI PURNOMO)